



# **SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

## **RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)**

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA**

**2025**

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dapat diselesaikan.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses mitigasi risiko serta memastikan implementasi yang berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada 5 (lima) unsur pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih.

Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Purbalingga, 31 Januari 2025

**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**



**ATO SUSANTO, AP, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| KATA PENGANTAR.....   | i  |
| DAFTAR ISI.....   | ii |
| BAB I GAMBARAN UMUM.....  | 1  |
| A. Pendahuluan .....  | 1  |
| B. Sekilas tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ..... | 5  |
| BAB II PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN .....        | 10 |
| A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....                      | 10 |
| B. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian .....                    | 11 |
| BAB III PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) ...    | 13 |
| A. Penetapan Konteks .....  | 13 |
| B. Hasil Identifikasi Risiko .....                                    | 21 |
| C. Hasil Analisis Risiko.....   | 21 |
| D. Pengendalian yang Sudah dilakukan .....                            | 22 |
| E. Pengendalian yang masih dibutuhkan .....                           | 24 |
| F. Rancangan Informasi dan Komunikasi.....                            | 25 |
| G. Rancangan Pemantauan .....   | 25 |
| BAB IV PENUTUP .....  | 27 |

# BAB I

## GAMBARAN UMUM

### A. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, Gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Selanjutnya sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyelenggarakan SPIP telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem Pengendalian Intern yang dibangun akan efisien dan efektif jika dirancang dengan tepat. Untuk itu perlu disusun langkah-langkah dan perencanaan strategis sebagai upaya mengintegrasikan SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga

#### 1. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi serta guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi acuan

penyelenggaraan SPIP terintegrasi dalam melaksanakan setiap aktivitas/kegiatan dilingkungan Inspektorat Daerah.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan kebijakan yang dibuat sebagai upaya membangun pengendalian yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, Renja, maupun Perjanjian Kinerja.

## **2. Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga**

### **a. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

- a) Inspektur
- b) Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Koordinator Perencanaan
  - 2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
  - 3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- c) Inspektur Pembantu Wilayah I
- d) Inspektur Pembantu Wilayah II
- e) Inspektur Pembantu Wilayah III
- f) Inspektur Pembantu Khusus
- g) Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Inspektorat membawahi 2 Sub bagian dan 1 Sub Koordinator Perencanaan yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub bagian yaitu Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan serta Kelompok Jabatan Fungsional Perencana.

3 (tiga) orang Inspektur Pembantu Wilayah dan 1 (satu) orang Inspektur Pembantu Khusus yang merupakan unsur pelaksana

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah dan OPD tertentu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD).

#### **b. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah..

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Inspektorat Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya..

### **3. Dasar Hukum**

Rencana Tindak Pengendalian ini disusun berdasarkan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah

- d. Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- f. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;

#### **4. Maksud dan Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

#### **5. Ruang Lingkup**

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

#### **6. Manfaat**

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian ini diarahkan untuk menjadi landasan/dasar dalam hal :

- a. Pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- b. Sebagai dasar dalam membangun instrument pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;

- c. Pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan/ progres penyelenggaraan SPIP.

## **B. Sekilas tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

### **1. Pengertian**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan konsep pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Definisi SPIP di atas dipahami oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

### **2. Tujuan SPIP**

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **3. Unsur-Unsur SPIP**

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut yaitu:



## 1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

## 2) Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk :

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas :

- a. Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu;
- b. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko;
- c. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

### 3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

### 4) Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan

fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

#### **5) Pemantauan Pengendalian Intern**

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit. Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi.

#### **4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan. Pernyataan

sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

## BAB II

### PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

#### A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPIP. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga bertujuan untuk :

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif;
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Berdasarkan hasil penilaian Kondisi Lingkungan Pengendalian Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga diperoleh gambaran sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

#### **Hasil Survei Persepsi**

| No | Sub. Unsur  | Kondisi        |
|----|---|----------------|
| 1. | Penegakan Integritas dan Nilai Etika                                | Memadai        |
| 2  | Komitmen Terhadap Kompetensi  | Memadai        |
| 3  | Kepemimpinan Yang Kondusif  | Memadai        |
| 4  | Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan        | Memadai        |
| 5  | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat                | Memadai        |
| 6  | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM | Memadai        |
| 7  | Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif   | Kurang Memadai |
| 8  | Hubungan Kerja yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait         | Memadai        |

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Tahun 2024 serta Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dimana terdapat kelemahan berupa :

- a. Masih terdapat temuan atas LHP BPK terkait Pengamanan Aset Daerah yang masih berulang atau belum tuntas
- b. Pemantauan atas RTP belum dilakukan secara berkala/periodik, sebagian besar sebatas jika ada instruksi/arahan. Penilaian risiko fraud belum sepenuhnya menghasilkan peta risiko korupsi
- c. Pelaksanaan Audit Ketaatan (*Compliance Audit*) belum sepenuhnya menyusun/ mengembangkan langkah kerja pengawasan yang mempertimbangkan risiko-risiko strategis yang ada pada objek pengawasan
- d. Jasa Konsultasi yang diberikan Inspektorat belum seluruhnya mengarah pada pembinaan kepada perangkat daerah yang masih memiliki tingkat kematangan MR yang rendah maupun perangkat daerah yang belum memiliki Register Risiko/Profil Risiko, sehingga layanan konsultasi belum mampu memberikan perbaikan terhadap pengelolaan risiko di Lingkungan Pemkab Purbalingga

#### **B. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian**

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian**

| No | Sub Unsur/Rencana Tindak Pengendalian   | Penanggungjawab             | Waktu Pelaksanaan   |
|----|---|-----------------------------|---------------------|
| 1. | Perwujudan Peran APIP yang Efektif  |                             |                     |
|    | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Aset, Persediaan, dan Kas Opname pada Perangkat Daerah | Irbawil 1, 2, 3             | Januari 2025        |
|    | Reviu Rencana Tindak Pengendalian OPD Tahun 2025 dan Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 2024  | Irbawil 1, 2, 3             | Maret 2025          |
|    | Pendampingan Penilaian Risiko Kecurangan  | Irbansus                    | Januari 2025        |
|    | Reviu Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2025                                   | Irbawil 1,2, 3 dan Irbansus | Triwulan II dan III |
|    | Peningkatan Kapasitas SDM APIP dengan melaksanakan Diklat, Bimtek dan Inhouse Training      | Sekretaris                  | Semester 1 dan 2    |

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

- Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)*
- Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Inspektorat Daerah Purbalingga*
- Form 1.c Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Inspektorat Daerah Purbalingga*

## BAB III

### PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

#### A. Penetapan Konteks

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah (disusun pada tingkat pemda);
- 2) Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- 3) Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 yang didalamnya memuat Visi Misi yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2021-2026 yaitu ***“Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”*** dengan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;



6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan

Mendasari pada visi dan misi tersebut, Inspektorat Daerah merupakan instansi yang memiliki peran strategis dan penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Inspektorat berperan dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*). Sehingga Inspektorat sangat erat kaitannya dengan pencapaian misi pertama yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang mengarah pada upaya menyelenggarakan pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai upaya mencapai misi tersebut, penetapan Konteks Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

#### 1. Risiko Strategis Inspektorat Daerah

**Tabel 3.1**  
**Penetapan Konteks Strategis**

|   |  |   |       |
|---|--|---|-------|
| Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko   | Tujuan :   |   |       |
|   | 1. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga         |   |       |
|   | 2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah   |   |       |
|   | Sasaran :  |   |       |
|   | 1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah                                 |   |       |
|   | 2. Meningkatnya Penguatan Pencegahan Korupsi dan Penanganan Pengaduan yang berindikasi Korupsi |   |       |
|   | 3. Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah  |   |       |
|   | IKU  |   |       |
|   | 1  | Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)        | 3,080 |
|   | 2  | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai ditindaklanjuti | 93,8  |
| 3   | Nilai Kapabilitas APIP   | 3,04  |       |
| 4   | Nilai IEPK   | 2,950   |       |
| 5   | Presentase tertanganinya Pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi                      | 100%  |       |
| 6   | Nilai Kematangan Perangkat Daerah  | 55  |       |
| 7   | Nilai SAKIP Inspektorat Daerah   | 77,30   |       |
| Program Penyelenggaraan Pengawasan<br>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi<br>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |   |       |



## 2. Risiko Operasional Inspektorat Daerah

**Tabel 3.2**  
**Penetapan Konteks Operasional**

| Tujuan Strategis   | : Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga<br>Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah   |                |   |  |                 |   |  |                     |
|--|--|----------------|---|--|-----------------|---|--|---------------------|
| Sasaran Strategis  | : Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah<br>Meningkatnya Penguatan Pencegahan Korupsi dan Penanganan Pengaduan yang berindikasi Korupsi<br>Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah |                |   |  |                 |   |  |                     |
| Program, Indikator Program, Target Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, Target Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan, Target Sub Kegiatan : |  |                |   |  |                 |   |  |                     |
| Program  | Indikator Program  | Target Program | Kegiatan  | Indikator Kegiatan                             | Target Kegiatan | Sub Kegiatan  | Indikator Sub Kegiatan   | Target Sub Kegiatan |
| Program Penyelenggaraan Pengawasan   | - <b>Persentase Nilai Potensial Kerugian Daerah/Negara yang Berhasil Ditarik</b>   | 73,2           | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b> | <b>Jumlah Objek Pemeriksaan yang diperiksa</b> | 154             | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4                   |
|  | - <b>Persentase Capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan</b>   | 100            |   |  |                 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah   | 39                  |
|  |  |                |   |  |                 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | 52                  |
|  |  |                |   |  |                 | Reviu Laporan Kinerja   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja   | 123                 |
|  |  |                |   |  |                 | Reviu Laporan Keuangan  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan  | 1                   |
|  |  |                |   |  |                 | Pengawasan Desa   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa   | 23                  |

|   |   |  |  |  |   |   |   |  |    |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--|----|
|   |   |  | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti  | 100,00%   | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                         | 2  |    |
|   |   |  |  |  |   | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu               | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu                                    | 28   |    |
| Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | - | Nilai Indeks Manajemen Risiko  | 2,90   | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan | 100,00%   | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan   | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun  | 3  |
|   | - | Nilai MCP Korsupgah (Area Penguatan APIP)                            | 93,10  | Kegiatan Pendampingan dan Asistensi  | Jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP korpsupgah                                     | 4   | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah                   | 8  |
|   | - | Persentase Pengaduan Berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terbukti | 100  |  | Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM                          | 5   | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 21 |
|   |   |  |  |  |   |   | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | 4  |
|   |   |  |  |  |   |   | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas           | 8  |

|  |   |  |     |   |   |     |   |   |    |
|--|---|--|-----|---|---|-----|---|---|----|
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja  | 100 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan | 100 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               | Jumlah Dokumen Perencanaan Inspektorat Daerah                                       | 3  |
|  | - | Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti   | 100 |   | Persentase dokumen laporan disusun  | 100 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | 10 |
|  | - | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan      | 100 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 48 |
|  | - | Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan                                       | 100 |   |   |     | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 |
|  | - | Persentase pemeliharaan barang milik daerah  | 100 |   |   |     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                     | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                            | 12 |
|  |   |  |     | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah                                 | Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan      | 100 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD                   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                    | 4  |
|  |   |  |     | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Terpenuhinya Jam Latihan Pegawai                                 | 100 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 48 |

|  |  |  |  |  |     |  |  |    |
|--|--|--|--|--|-----|--|--|----|
|  |  |  | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                   | <b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor</b> | 100 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan     | 1  |
|  |  |  |  |  |     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan                                     | 12 |
|  |  |  |  |  |     | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 12 |
|  |  |  |  |  |     | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                    | 12 |
|  |  |  |  |  |     | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 2  |
|  |  |  | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase Kebutuhan Jasa Kantor yang Tersedia</b>                      | 100 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2  |
|  |  |  |  |  |     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 |
|  |  |  |  |  |     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 |

|  |  |  |   |   |     |  |  |    |
|--|--|--|---|---|-----|--|--|----|
|  |  |  | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara</b> | 100 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 23 |
|  |  |  |   |   |     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 58 |
|  |  |  |   |   |     | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi                                 | 1  |

## **B. Hasil Identifikasi Risiko**

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 14 risiko strategis dan 64 risiko operasional.

Rincian Identifikasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran :

Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis

Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional

## **C. Hasil Analisis Risiko**

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Tujuannya adalah untuk memahami risiko yang mungkin terjadi, menilai dampaknya, dan menentukan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Adapun rincian analisis risiko dapat dilihat pada lampiran form 4.

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 700/6652/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Pengelolaan Risiko Strategis dan Risiko Operasional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, Analisis Risiko dan penentuan prioritas penanganan risiko telah dilakukan menggunakan Matrik Nilai Risiko sebagai berikut :



| Matriks Analisis Risiko       |                       |   | Dampak/Konsekuensi |       |        |               |
|-------------------------------|-----------------------|---|--------------------|-------|--------|---------------|
|                               |                       |   | Tidak signifikan   | Kecil | Tinggi | Sangat Tinggi |
|                               |                       |   | 1                  | 2     | 3      | 4             |
| Kemungkinan Terjadinya Risiko | Hampir Pasti Terjadi  | 5 | 5                  | 10    | 15     | 20            |
|                               | Sering Terjadi        | 4 | 4                  | 8     | 12     | 16            |
|                               | Kadang Terjadi        | 3 | 3                  | 6     | 9      | 12            |
|                               | Jarang Terjadi        | 2 | 2                  | 4     | 6      | 8             |
|                               | Hampir Jarang Terjadi | 1 | 1                  | 2     | 3      | 4             |

| Keterangan Warna | Hijau         | Biru   | Orange | Merah         |
|------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| Level Risiko     | Sangat rendah | Rendah | Tinggi | Sangat Tinggi |
| Besaran Risiko   | 1-4           | 6-8    | 9-14   | 15-20         |

Dasar penentuan toleransi risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat diterima atau yang disebut dengan selera risiko ditetapkan risiko dengan level tinggi hingga sangat tinggi ( $\geq 9$ ) menjadi risiko prioritas yang harus ditangani. Berdasarkan hal tersebut, Hasil analisis risiko pada tahun 2025 Inspektorat Daerah telah menetapkan 19 (Sembilan belas) risiko prioritas yang terdiri dari 5 (lima) risiko strategis dan 14 (enam belas) risiko operasional.

Terhadap risiko-risiko prioritas yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas.

#### D. Pengendalian yang Sudah dilakukan

Atas Risiko-risiko yang diprioritaskan, telah dilakukan upaya pengendalian sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pengendalian yang sudah dilakukan**

| No                                | Risiko Prioritas   | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)  |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>I</b>                          | <b>Risiko Strategis</b>  |  |
| 1                                 | OPD Belum memetakan Potensi Kecurangan / Potensi terjadinya Korupsi  | Perbup Pedoman Pengelolaan Risiko, Perbup Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah  |
| 2                                 | OPD dan Pemda terlambat dalam melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi   | 1. Telah dilaksanakan Sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP<br>2. Telah dibentuk Tim Asesor OPD dan Pemda<br>3. Telah dibentuk Satgas SPIP                                    |
| 3                                 | Keterlambatan Obrik dalam penyelesaian tidaklanjut Hasil Pemeriksaan   | Telah disusun Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Kabupaten Purbalingga                                  |
| 4                                 | Pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian Risiko Fraud belum dilaksanakan secara berkala                                     | Perbup Pedoman Pengelolaan Risiko, Perbup Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah  |
| 5                                 | Pegawai tidak memanfaatkan saluran whistleblowing karena masih tidak percaya mekanisme perlindungan pelapor berjalan           | Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan ( <i>Whistle Blowing System</i> ) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Purbalingga |
| <b>II</b>                         | <b>Risiko Operasional</b>  |  |
| <b>PENGAWASAN INTERNAL</b>        |  |  |
| 6                                 | Dokumen Pendukung Pengawasan Kinerja tidak dapat diperoleh tepat waktu   | Koordinasi intensif dengan OPD Terkait sebelum pemeriksaan dilaksanakan  |
| 7                                 | Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Keuangan  | Pemantauan secara berkala Progres Penyelesaian LHP Secara Online   |
| 8                                 | Ketidaksesuaian dokumen tindaklanjut dengan Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP   | Telah disusun Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Kabupaten Purbalingga                                  |
| 9                                 | Keterlambatannya Penyusunan LH Pengawasan Kinerja  | 1. Pemantauan secara berkala Progres Penyelesaian LHP Secara Online<br>2. SOP dan Standar Pelayanan Pengawasan Keuangan  |
| 10                                | Rekomendasi hasil pengawasan laporan kinerja tidak tepat   | 1. Reviu berjenjang oleh pimpinan<br>2. SOP dan Standar Pelayanan Pengawasan Kinerja   |
| 11                                | Dokumen pendukung kegiatan pengawasan keuangan tidak didapatkan tepat waktu  | 1. Pemantauan secara berkala Progres Penyelesaian LHP Secara Online<br>2. SOP dan Standar Pelayanan Pengawasan Keuangan  |
| <b>PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b> |  |  |
| 12                                | Tingginya beban kerja APIP   | Anjab dan ABK  |
| 13                                | Evidence SPIP yang tidak sesuai  | 1. Telah dibentuk Tim Asesor OPD dan Pemda<br>2. Rapat Koordinasi  |
| 14                                | Ketidaksesuaian Rencana Aksi dengan Rekomendasi Hasil evaluasi maupun dengan Indikator Kegiatan Utama General dan tema tematik | 1. Telah dibentuk Tim RB Kabupaten<br>2. Rapat Koordinasi  |
| 15                                | Ketidaksesuaian dokumen Pendukung/ Evidence Penilaian Mandiri Zona Integritas  | 1. Terdapat tim pembangunan zona Integritas Unit Kerja<br>2. Telah dibentuk Tim Penilai Internal   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 16  | OPD tidak segera melaksanakan Perbaikan/tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB terkait Penilaian Zona Integritas | 1. Terdapat tim pembangunan zona Integritas Unit Kerja<br>2. Telah dibentuk Tim Penilai Internal   |
| <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b> |  |  |
| 17  | Manipulasi data e-kinerja pegawai ASN  | 1. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.<br>2. Perbup No. 36 Tahun 2022 tentang TPP.<br>3. Bukti penugasan individu bulanan<br>4. Verifikasi langsung atasan                                      |
| 18  | Keterlambatan proses pengadaan   | 1. Penunjukan Pejabat Pengadaan<br>2. Terdapat Rencana Umum Pengadaan  |
| 19  | Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi   | 1. Perbup No. 71 Tahun 2020 tentang pengelolaan BMD<br>2. SK Pemegang BMD<br>3. Pakta Integritas<br>4. Labelling BMD setiap semesteran<br>5. KIR<br>6. KIB<br>7. BA Serah Terima Aset<br>8. Rekon Aset |

Meskipun telah melaksanakan kegiatan pengendalian namun kegiatan pengendalian yang dilaksanakan masih terdapat celah sehingga membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada tahun 2025 ini disusun rencana pengendalian, menetapkan penanggungjawab pengendalian risiko dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran *Form 6 dan 7*.

*Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian*

*Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko*

#### **E. Pengendalian yang masih dibutuhkan**

Penilaian terhadap pengendalian yang sudah dilakukan/ yang sudah ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Atas hasil evaluasi efektifitas atas pengendalian yang sudah ada kemudahan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP). RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang masih dibutuhkan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I : *Form 6 dan Form 7*

#### **F. Rancangan Informasi dan Komunikasi**

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan media informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Inspektorat Daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak yang terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dapat disampaikan melalui berbagai media seperti Surat, Rapat, *Focus Grup Discussion*, sosialisasi, dan lain sebagainya. Secara rinci rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran *Form 8* (kolom a - f). (*Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sehingga masih terdapat kolom yang kosong*).

#### **G. Rancangan Pemantauan**

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

##### **1. Pemantauan atas implementasi pengendalian**

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran *Form 9*

*Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan (kolom f dan g).*

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka Inspektorat Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran *Form 10 Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Event) dan Pelaksanaan RTP (kolom d - g, dan kolom j - k).*

## BAB IV PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Purbalingga, 31 Januari 2025  
**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

  
**ATO SUSANTO, AP, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740706 199311 1 001

# LAMPIRAN

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN  
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun Penilaian : 2025

| NO.       | PERTANYAAN /KUESIONER   | JAWABAN RESPONDEN (R) |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | SIMPULAN<br>KUOSIONER CEE              |     |         |         |
|-----------|---|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|---------|---------|
|           |   | R1                    | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 |  | R28 | R29     | Modus   |
| a         | b   | c                     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | d                                      |     |         |         |
| <b>A.</b> | <b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>   |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | <b>MEMADAI/<br/>KURANG<br/>MEMADAI</b> |     |         |         |
| 1         | Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)                                    | 4                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4   | 4   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3                                      | 3   | Memadai |         |
| 2         | Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai        | 4                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 4                                      | 3   | 3       | Memadai |
| 3         | Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik                                      | 4                     | 4  | 3  | 4  | 1  | 3  | 3  | 3  | 4  | 2   | 4   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3                                      | 3   | Memadai |         |
| 4         | Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti   | 4                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3                                      | 3   | Memadai |         |
| <b>B</b>  | <b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>   |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | <b>MEMADAI/<br/>KURANG<br/>MEMADAI</b> |     |         |         |
| 1         | Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan   | 4                     | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 2  | 3  | 2   | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3                                      | 3   | Memadai |         |
| 2         | Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan   | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 2  | 3  | 2   | 3   | 3   | 3   | 4   | 2   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3                                      | 3   | Memadai |         |
| 3         | Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai   | 3                     | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 3  | 2   | 4   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 4   | 3                                      | 3   | Memadai |         |
| 4         | Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.  | 3                     | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 3  | 3  | 2   | 3   | 2   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 2   | 3   | 2   | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3                                      | 3   | Memadai |         |
| <b>C</b>  | <b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>   |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | <b>MEMADAI/<br/>KURANG<br/>MEMADAI</b> |     |         |         |
| 1         | Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko  | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3                                      | 3   | Memadai |         |
| 2         | Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan   | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 0   | 3   | 3   | 3                                      | 2   | 3       | Memadai |
| 3         | Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   | 4   | 3                                      | 2   | 3       | Memadai |



| NO. | PERTANYAAN / KUESIONER   | JAWABAN RESPONDEN (R) |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | SIMPULAN<br>KUOSIONER CEE |     |         |         |         |
|-----|--|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|---------------------------|-----|---------|---------|---------|
|     |  | R1                    | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27                                    |                           | R28 | R29     | Modus   |         |
| a   | b  | c                     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | d                         |     |         |         |         |
| 4   | Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja   | 4                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4   | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 4   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3                                      | 3                         | 3   | 3       | 3       | Memadai |
| 5   | Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda  | 4                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3   | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 4   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3                                      | 3                         | 3   | 3       | Memadai |         |
| 6   | Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat  | 4                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 4   | 3   | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3                                      | 3                         | 3   | Memadai |         |         |
| 7   | Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko   | 4                     | 3  | 2  | 4  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 4   | 3   | 3   | 2   | 3   | 4   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2                                      | 3                         | 2   | 3       | Memadai |         |
| 8   | Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko                                     | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 4   | 3   | 3   | 2   | 3   | 4   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4                                      | 3                         | 3   | 3       | Memadai |         |
| D   | <b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>  |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | <b>MEMADAI/<br/>KURANG<br/>MEMADAI</b> |                           |     |         |         |         |
| 1   | Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat  | 4                     | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 4   | 3   | 3   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3                                      | 3                         | 3   | Memadai |         |         |
| 2   | Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko | 3                     | 3  | 3  | 4  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2   | 4   | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2                                      | 3                         | 2   | 3       | Memadai |         |
| 3   | Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)                                | 4                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 2   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4                                      | 3                         | 3   | 3       | Memadai |         |

| NO. | PERTANYAAN /KUESIONER   | JAWABAN RESPONDEN (R) |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               | SIMPULAN<br>KUOSIONER CEE |     |         |         |
|-----|---|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|---------------------------|-----|---------|---------|
|     |   | R1                    | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27                           |                           | R28 | R29     | Modus   |
| a   | b   | c                     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                               | d                         |     |         |         |
| 4   | Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko   | 4                     | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3                             | 2                         | 3   | Memadai |         |
| E   | PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB YANG TEPAT   |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | MEMADAI/<br>KURANG<br>MEMADAI |                           |     |         |         |
| 1   | Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat   | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2   | 3   | 3   | 3   | 2   | 2   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3                             | 3                         | 3   | Memadai |         |
| 2   | Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat   | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 4   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 2                             | 3                         | 3   | Memadai |         |
| 3   | Kewenangan direviu secara periodik  | 3                     | 3  | 2  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3   | 1   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2                             | 3                         | 3   | Memadai |         |
| F   | PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA   |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | MEMADAI/<br>KURANG<br>MEMADAI |                           |     |         |         |
| 1   | Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)  | 4                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2   | 3   | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 2                             | 3                         | 3   | Memadai |         |
| 2   | Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik  | 4                     | 3  | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 2   | 3   | 3   | 3   | 2   | 2   | 0   | 3   | 4   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2                             | 3                         | 3   | Memadai |         |
| 3   | Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja   | 4                     | 3  | 3  | 4  | 2  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3   | 1   | 2   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3                             | 3                         | 3   | Memadai |         |
| 4   | Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko   | 4                     | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 3   | 3                             | 2                         | 3   | Memadai |         |
| 5   | Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) | 4                     | 3  | 2  | 4  | 2  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 4   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3                             | 2                         | 3   | Memadai |         |
| 6   | Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan  | 4                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 2   | 3   | 2   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3                             | 3                         | 3   | Memadai |         |
| 7   | Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM  | 3                     | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 1  | 3  | 3  | 1   | 3   | 2   | 3   | 1   | 2   | 3   | 2   | 3   | 2   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3                             | 3                         | 2   | 3       | Memadai |
| G   | PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF   |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | MEMADAI/<br>KURANG<br>MEMADAI |                           |     |         |         |
| 1   | Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/ program Secara periodik   | 4                     | 3  | 2  | 4  | 3  | 4  | 2  | 3  | 3  | 4   | 4   | 3   | 3   | 2   | 3   | 4   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4                             | 3                         | 3   | Memadai |         |
| 2   | Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya  | 4                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4   | 4   | 3   | 3   | 3   | 4   | 4   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 4                             | 3                         | 3   | Memadai |         |



**CEE Berdasarkan Dokumen**  
**Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern**  
**di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga**

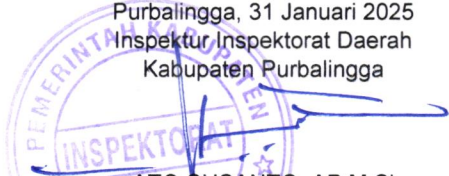

| Tahun Penilaian : 2025 |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|
| No.                    | Sumber data   | Uraian Kelemahan  | Klasifikasi   |
| a                      | b   | c   | d   |
| 1                      | Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | a. Masih terdapat temuan atas LHP BPK terkait Pengamanan Aset Daerah yang masih berulang atau belum tuntas<br>b. Pemantauan atas RTP belum dilakukan secara berkala/periodik, sebagian besar sebatas jika ada instruksi/arahan. Penilaian risiko fraud belum sepenuhnya menghasilkan peta risiko korupsi  | PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF |
| 2                      | Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2024   | a. Pelaksanaan Audit Ketaatan (Compliance Audit) belum sepenuhnya menyusun/ mengembangkan langkah kerja pengawasan yang mempertimbangkan risiko-risiko strategis yang ada pada objek pengawasan<br>b. Jasa Konsultasi yang diberikan Inspektorat belum seluruhnya mengarah pada pembunaa kepada perangkat daerah yang masih memiliki tingkat kematangan MR yang rendah maupun perangkat daerah yang belum memiliki Register Risiko/Profil Risiko, sehingga layanan konsultasi belum mampu memberikan perbaikan terhadap pengelolaan risiko di Lingkungan Pemkab Purbalingga | PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF |

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern  
Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga**

| Tahun Penilaian |   | : 2025              |   |                       |        |  |   |
|-----------------|---|---------------------|---|-----------------------|--------|--|---|
| No.             | Sub unsur   | Hasil Reviu Dokumen |   | Hasil Survei Persepsi |        | Simpulan   | Penjelasan  |
|                 |   | Hasil               | Uraian  | Hasil                 | Uraian |  |   |
| a               | b   | c                   | d   | e                     | f      | g  | h   |
| 1               | Penegakan integritas dan nilai etika                                | Memadai             |   | Memadai               |        | Memadai  |   |
| 2               | Komitmen terhadap kompetensi  |                     |   | Memadai               |        | Memadai  |   |
| 3               | Kepemimpinan yang kondusif  |                     |   | Memadai               |        | Memadai  |   |
| 4               | Struktur organisasi sesuai kebutuhan                                |                     |   | Memadai               |        | Memadai  |   |
| 5               | Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat                |                     |   | Memadai               |        | Memadai  |   |
| 6               | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM |                     |   | Memadai               |        | Memadai  |   |
| 7               | Perwujudan peran APIP yang efektif                                  | Kurang<br>Memadai   | a. Masih terdapat temuan atas LHP BPK terkait Pengamanan Aset Daerah yang masih berulang atau belum tuntas<br>b. Pemantauan atas RTP belum dilakukan secara berkala/periodik, sebagian besar sebatas jika ada instruksi/arahan. Penilaian risiko fraud belum sepenuhnya menghasilkan peta risiko korupsi  | Memadai               |        | Kurang<br>Memadai  | Berdasarkan Laporan Hasil LHE Maturitas SPIP masih terdapat beberapa catatan dimana catatan tersebut terdapat peran andil APIP yang cukup besar |
|                 |   |                     | a. Pelaksanaan Audit Ketaatan (Compliance Audit) belum sepenuhnya menyusun/ mengembangkan langkah kerja pengawasan yang mempertimbangkan risiko-risiko strategis yang ada pada objek pengawasan<br>b. Jasa Konsultasi yang diberikan Inspektorat belum seluruhnya mengarah pada pembunaa kepada perangkat daerah yang masih memiliki tingkat kematangan MR yang rendah maupun perangkat daerah yang belum memiliki Register Risiko/Profil Risiko, sehingga layanan konsultasi belum mampu memberikan perbaikan terhadap pengelolaan risiko di Lingkungan Pemkab Purbalingga |                       |        | Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga masih terdapat beberapa catatan dimana catatan tersebut terdapat peran andil APIP yang cukup besar |   |
| 8               | Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait         |                     |   | Memadai               |        | Memadai  |   |

## PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Nama Pemda  | Pemerintah Kabupaten Purbalingga  |   |   |
| Tahun Penilaian   | 2025  |   |   |
| Periode yang dinilai  | 2021-2016   |   |   |
| Urusan Pemerintahan   | Urusan Pengawasan   |   |   |
| OPD yang Dinilai  | Inspektorat Daerah  |   |   |
| Sumber Data   | Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Renja 2025, IKU Inspektorat Daerah  |   |   |
| Tujuan Strategis  | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga   |   |   |
|   | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah   |   |   |
| Sasaran Strategis   | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah   |   |   |
|   | Meningkatnya Penguatan Pencegahan Korupsi dan Penanganan Pengaduan yang berindikasi Korupsi   |   |   |
|   | Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah  |   |   |
| IKU OPD   | <b>IKU</b>  |   | <b>2025</b>   |
|   | 1   | Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)            | 3,080   |
|   | 2   | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai ditindaklanjuti     | 93,8  |
|   | 3   | Nilai Kapabilitas APIP  | 3,04  |
|   | 4   | Nilai IEPK  | 2,950   |
|   | 5   | Persentase tertanganinya Pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi | 100   |
|   | 6   | Nilai Kematangan Perangkat Daerah   | 55  |
|   | 7   | Nilai SAKIP Inspektorat Daerah  | 77,30   |
| Program   | Program Penyelenggaraan Pengawasan  |   |   |
|   | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi   |   |   |
|   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |   |
| Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko | <p>Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga<br/>Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</li> <li>Meningkatnya Penguatan Pencegahan Korupsi dan Penanganan Pengaduan yang berindikasi Korupsi</li> <li>Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah</li> </ol> |   |   |
|   | <b>IKU</b>  |   |   |
|   | 1   | Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)            | 3,08  |
|   | 2   | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai ditindaklanjuti     | 93,8  |
|   | 3   | Nilai Kapabilitas APIP  | 3,04  |
|   | 4   | Nilai IEPK  | 2,95  |
|   | 5   | Persentase tertanganinya Pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi | 100   |
|   | 6   | Nilai Kematangan Perangkat Daerah   | 55  |
|   | 7   | Nilai SAKIP Inspektorat Daerah  | 77,3  |
|   | Program Penyelenggaraan Pengawasan  |   |   |
|   | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi   |   |   |
|   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |   |
|   |   |   | <p>Purbalingga, 31 Januari 2025</p> <p>Inspektur Inspektorat Daerah<br/>Kabupaten Purbalingga</p>  <p>ATO SUSANTO, AP, M.Si<br/>Pembina Utama Muda<br/>NIP 19740706 199311 1 001</p>  |

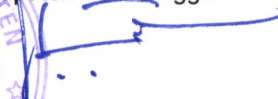

## PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

| Nama Pemda   | :   | Pemerintah Kabupaten Purbalingga   |  |   |                 |   |  |                     |
|--|---|--|--|---|-----------------|---|--|---------------------|
| Tahun Penilaian  | :   | 2025   |  |   |                 |   |  |                     |
| Periode yang dinilai   | :   | 2021-2016  |  |   |                 |   |  |                     |
| Urusan Pemerintahan  | :   | Urusan Pengawasan  |  |   |                 |   |  |                     |
| OPD yang Dinilai   | :   | Inspektorat Daerah   |  |   |                 |   |  |                     |
| Sumber Data  | :   | Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Renja 2025, IKU Inspektorat Daerah   |  |   |                 |   |  |                     |
| Tujuan Strategis   | :   | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga<br>Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah   |  |   |                 |   |  |                     |
| Sasaran Strategis  | :   | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah<br>Meningkatnya Penguatan Pencegahan Korupsi dan Penanganan Pengaduan yang berindikasi Korupsi<br>Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah |  |   |                 |   |  |                     |
| Program, Indikator Program, Target Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, Target Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan, Target Sub Kegiatan : |   |  |  |   |                 |   |  |                     |
| Program  | Indikator Program   | Target Program   | Kegiatan                                     | Indikator Kegiatan                      | Target Kegiatan | Sub Kegiatan  | Indikator Sub Kegiatan   | Target Sub Kegiatan |
| Program Penyelenggaraan Pengawasan   | - Persentase Nilai Potensial Kerugian Daerah/Negara yang Berhasil Ditarik | 73,2   | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Objek Pemeriksaan yang diperiksa | 154             | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4                   |
|  | - Persentase Capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan                     | 100  |  |   |                 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah   | 39                  |
|  |   |  |  |   |                 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | 52                  |
|  |   |  |  |   |                 | Reviu Laporan Kinerja   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja   | 123                 |
|  |   |  |  |   |                 | Reviu Laporan Keuangan  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan  | 1                   |
|  |   |  |  |   |                 | Pengawasan Desa   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa   | 23                  |

|   |  |       |  |   |         |   |  |    |
|---|--|-------|--|---|---------|---|--|----|
|   |  |       | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                         | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti   | 100,00% | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah   | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani  | 2  |
|   |  |       |  |   |         | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu   | 28 |
|   |  |       |  |   |         |   |  |    |
|   |  |       |  |   |         |   |  |    |
| Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | - Nilai Indeks Manajemen Risiko  | 2,90  | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan | 100,00% | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan   | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun  | 3  |
|   | - Nilai MCP Korsupgah (Area Penguatan APIP)                            | 93,10 | Kegiatan Pendampingan dan Asistensi  | Jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP korpugah                                       | 4       | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah                   | 8  |
|   | - Persentase Pengaduan Berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terbukti | 100   |  | Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM                          | 5       | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 21 |
|   |  |       |  |   |         | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | 4  |
|   |  |       |  |   |         | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikas Penegakan Integritas            | 8  |
|   |  |       |  |   |         |   |  |    |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah              | - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Daerah               | 100   | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | Persentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan             | 100     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Inspektorat Daerah  | 3  |
|   | - Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti         | 100   |  | Persentase dokumen laporan disusun  | 100     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 10 |



|  |   |  |     |   |  |     |  |  |    |
|--|---|--|-----|---|--|-----|--|--|----|
|  | - | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan | 100 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 48 |
|  | - | Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan                                       | 100 |   |  |     | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     | 12 |
|  | - | Persentase pemeliharaan barang milik daerah  | 100 |   |  |     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                              | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                               | 12 |
|  |   |  |     | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah                     | Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan | 100 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD                            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                       | 4  |
|  |   |  |     | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah            | Persentase Terpenuhinya Jam Latihan Pegawai                            | 100 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 48 |
|  |   |  |     | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor    | 100 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan     | 1  |
|  |   |  |     |   |  |     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan                                     | 12 |
|  |   |  |     |   |  |     | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  | 12 |
|  |   |  |     |   |  |     | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                    | 12 |
|  |   |  |     |   |  |     | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 2  |
|  |   |  |     | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kebutuhan Jasa Kantor yang Tersedia                         | 100 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2  |
|  |   |  |     |   |  |     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 |

|  |  |   |  |  |     |  |  |    |
|--|--|---|--|--|-----|--|--|----|
|  |  |   |  |  |     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 |
|  |  |   | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara | 100 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 23 |
|  |  |   |  |  |     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 58 |
|  |  |   |  |  |     | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi                                 | 1  |
|  |  |   |  |  |     |  |  |    |
|  |  | <p style="text-align: right;">Purbalingga, 31 Januari 2025<br/> Inspektur Inspektorat Daerah<br/> Kabupaten Purbalingga</p>  <p style="text-align: right;">ATO SUSANTO, AP,M.Si<br/> Pembina Utama Muda<br/> NIP 19740706 199311 1 001</p>  |  |  |     |  |  |    |

**Kertas Kerja**  
**Identifikasi Risiko Strategis OPD**

| Nama Pemda           | Pemerintah Kabupaten Purbalingga   |  |  |                   |                        |  |           |        |  |                    |  |
|----------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|--|-----------|--------|--|--------------------|--|
| Nama OPD             | Inspektorat Daerah   |  |  |                   |                        |  |           |        |  |                    |  |
| Tahun Penilaian      | 2025   |  |  |                   |                        |  |           |        |  |                    |  |
| Periode yang dinilai | 2021-2016  |  |  |                   |                        |  |           |        |  |                    |  |
| Tujuan Strategis     | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga<br>Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah |  |  |                   |                        |  |           |        |  |                    |  |
| Urusan Pemerintahan  | Urusan Pengawasan  |  |  |                   |                        |  |           |        |  |                    |  |
| No                   | Tujuan/Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Risiko   |                   |                        | Sebab  |           |        | C/UC   | Dampak             |  |
|                      |  |  | Uraian   | Kode Risiko       | Pemilik                | Uraian   | Sumber    | Uraian |  | Pihak yang Terkena |  |
| a                    | b  | c  | d  | e                 | f                      | g  | h         | i      | j  | k                  |  |
|                      | <b>Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah</b>   | <b>Nilai Maturitas SPIP</b>  | OPD Belum melakukan Penilaian Risiko Strategis dan Operasional   | RSO.2025.99.04.01 | Inspektur              | Kurang masifnya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Risiko                               | Internal  | C      | tidak terantisipasi risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan                        | Bupati/APIP        |  |
|                      |  |  | OPD Belum memetakan Potensi Kecurangan / Potensi terjadinya Korupsi  | RSO.2025.99.04.02 | Inspektur              | Kurang masifnya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Risiko                               | Internal  | C      | tidak terantisipasi risiko tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian daerah          | bupati/masyarakat  |  |
|                      |  |  | OPD Belum menyusun Rencana Mitigasi Risiko maupun potensi kecurangan   | RSO.2025.99.04.03 | Inspektur              | Kurang masifnya Sosialisasi Pedoman Penyusunan Fraud Control Plan                    | Internal  | C      | meningkatnya kemungkinan peristiwa yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi | bupati/masyarakat  |  |
|                      |  |  | OPD dan Pemda terlambat dalam melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi                                       | RSO.2025.99.04.04 | Inspektur              | Koordinasi antar tim Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi tidak berjalan dengan baik  | Internal  | C      | Penjanaan Kualitas atas PM SPIP terlambat  | bupati/masyarakat  |  |
|                      |  |  | Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi tidak dilaksanakan tepat waktu                          | RSO.2025.99.04.05 | Irbanwil III           | Terlambatnya Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi                                     | Internal  | C      | tidak dilakukan evaluasi atas PM SPIP oleh evaluator BPKP                                  | bupati/masyarakat  |  |
|                      | <b>Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</b>   | <b>Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai ditindaklanjuti</b> | Keterlambatan Obrik dalam penyelesaian tidaklanjut Hasil Pemeriksaan   | RSO.2025.99.04.06 | Inspektur              | Komitmen Pimpinan OPD dalam penyelesaian Tindakanlanjut                              | Internal  | C      | terhambatnya proses penyelesaian potensi kerugian negara                                   | bupati/masyarakat  |  |
|                      |  | <b>Nilai Kapabilitas APIP</b>  | Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tidak dilaksanakan Tepat Waktu  | RSO.2025.99.04.07 | Sekretaris Inspektorat | Banyaknya tugas-tugas pengawasan mandatory   | Internal  | C      | tidak dilakukan evaluasi atas PM Kapabilitas APIP oleh BPKP                                | bupati/masyarakat  |  |
|                      | <b>Meningkatnya Penguatan Pencegahan Korupsi dan Penanganan Pengaduan yang berindikasi Korupsi</b>   | <b>Nilai IEPK</b>  | Pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian Risiko Fraud belum dilaksanakan secara berkala                           | RSO.2025.99.04.08 | Inspektur              | Kurangnya kesadaran manajemen perangkat daerah dalam pengelolaan risiko fraud        | Eksternal | C      | Potensi kejadian fraud meningkat   | bupati/masyarakat  |  |
|                      |  |  | Kasus Gratifikasi meningkat  | RSO.2025.99.04.09 | Inspektur              | Kurangnya Pemahaman tentang Etika dan Moral Kerja serta rendahnya integritas pegawai | Eksternal | C      | Menurunnya kepercayaan publik dan meningkatnya risiko korupsi                              | bupati/masyarakat  |  |
|                      |  |  | Pegawai tidak memanfaatkan saluran whistleblowing karena masih tidak percaya mekanisme perlindungan pelapor berjalan | RSO.2025.99.04.10 | Irbansus               | Kepercayaan terhadap mekanisme perlindungan pelapor kurang                           | Internal  | C      | Meningkatnya potensi kejadian korupsi dan penyalahgunaan wewenang                          | bupati/masyarakat  |  |



**Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga  
 Nama OPD : Inspektorat Daerah  
 Tahun Penilaian : 2025  
 Periode yang dinilai :  
 Tujuan Strategis : 1. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah  
 Sasaran strategis OPD : 1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pengawasan

| No  | Kegiatan                            | Indikator Kegiatan                     | Target Kegiatan | Sub Kegiatan  | Indikator Sub Kegiatan   | Target Sub Kegiatan | Risiko    |   |                   |                               | Sebab*)   |           | C/UC | Dampak**)  |                                     |
|---|-------------------------------------|--|-----------------|---|--|---------------------|-----------|---|-------------------|-------------------------------|---|-----------|------|--|-------------------------------------|
|   |                                     |  |                 |   |  |                     | Tahap     | Uraian  | Kode Risiko       | Pemilik                       | Uraian  | Sumber    |      | Uraian   | Pihak yang Terkena                  |
| a   | b                                   | c                                      |                 |   |  |                     | d         | e   | f                 | g                             | h   | i         | j    | k  | l                                   |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b> |                                     |  |                 |   |  |                     |           |   |                   |                               |   |           |      |  |                                     |
| 1   | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa | 154             | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4                   |           | Keterlambatan penyusunan laporan ikhtisar   | ROO.2025.99.04.01 | Sub Bag Analisis dan Evaluasi | Pengumpulan data yang tidak tepat waktu   | eksternal | C    | manfaat menurun  | Masyarakat / Bupati                 |
|   |                                     |  |                 |   |  |                     |           | Ketidaksihinggaan dokumen tindak lanjut dengan Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP | ROO.2025.99.04.02 | Sub Bag Analisis dan Evaluasi | Pemahaman Obrik atas Rekomendasi Audit  | eksternal | C    | dokumen tindak lanjut tidak dapat diterima                                     | Bupati                              |
|   |                                     |  |                 |   |  |                     |           | Kurang tertibnya pengarsipan dokumentindak lanjut                                     | ROO.2025.99.04.03 | Sub Bag Analisis dan Evaluasi | Kelalaian Petugas Arsip   | internal  | C    | hilangnya dokumen tindak lanjut Obrik  | Obrik/Bupati                        |
|   |                                     |  |                 |   |  |                     |           | Rekomendasi APIP sudah tidak relevan untuk ditindaklanjuti                            | ROO.2025.99.04.04 | Tim Pemeriksa                 | Perubahan Regulasi  | eksternal | C    | Rekomendasi tidak dapat dilaksanakan   | Obrik/Bupati                        |
| 2   | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa | 154             | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah   | 39                  | Pelaporan | Keterlambatannya Penyusunan LH Pengawasan Kinerja                                     | ROO.2025.99.04.05 | Irbanwil                      | Penyusunan program kerja audit tidak handal   | Internal  | C    | Hasil Pemeriksaan kurang bermanfaat Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi | Objek pemeriksaan/ Bupati           |
|   |                                     |  |                 |   |  |                     |           | Dokumen Pendukung Pengawasan Kinerja tidak dapat diperoleh tepat waktu                | ROO.2025.99.04.06 | Inspektur                     | Tidak tertibnya pencatatan dan pengelolaan keuangan obrik                             | Eksternal | C    | Terganggunya proses audit  | APIP/ Bupati/ Masyarakat            |
|   |                                     |  |                 |   |  |                     |           | Rekomendasi hasil pengawasan laporan kinerja tidak tepat                              | ROO.2025.99.04.07 | Tim pemeriksa                 | Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam dan kekeliruan dalam mengambil kriteria audit |           |      | Rekomendasi tidak dapat diterapkan dan ditindaklanjuti                         | Obyek Pemeriksaan, Bupati, Instansi |
| 3   | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa | 154             | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan   | 52                  | Pelaporan | Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Keuangan                         | ROO.2025.99.04.08 | Sub Bag Analisis dan Evaluasi | Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal   | internal  | C    | Manfaat Hasil Pemeriksaan Menurun Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi   | APIP/Bupati/masyarakat at           |
|   |                                     |  |                 |   |  |                     |           | Dokumen pendukung kegiatan pengawasan keuangan tidak didapatkan tepat waktu           | ROO.2025.99.04.09 | Tim Pemeriksa                 | tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Obrik                             | eksternal | C    | Terganggunya Proses Audit  | Obrik/Bupati                        |

|   |   |   |     |                                   |  |     |           |   |                   |  |  |           |    |  |  |
|---|---|---|-----|-----------------------------------|--|-----|-----------|---|-------------------|--|--|-----------|----|--|--|
|   |   |   |     |                                   |  |     |           | Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam   | ROO.2025.99.04.10 | Tim Pemeriksa                                | Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal  | internal  | C  | Hasil Audit tidak dapat digunakan untuk  | Objek Pemeriksaan/Bupati                 |
|   |   |   |     |                                   |  |     |           | Kesalahan dalam Penetapan Jumlah Objek, ruang lingkup dan sasaran Pengawasan internal | ROO.2025.99.04.11 | Sekretariat, Irban                           | Kurang cermat dalam Penyusunan PKPT berbasis Risiko  | internal  | C  | Tujuan audit tidak tercapai/ hasil audit kurang bermanfaat                     | Bupati, Obrik, Inspektorat               |
|   | Penyelenggaraan Pengawasan Internal               | Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa    | 154 | Reviu Laporan Kinerja             | Jumlah Laporan Reviu Kinerja                     | 123 | Pelaporan | Keterlambatan Penyusunan LHR Kinerja  | ROO.2025.99.04.12 | Irbanwil                                     | Penyusunan Program Kerja Reviu tidak handal  | internal  | UC | Hasil Pemeriksaan kurang bermanfaat Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi | Objek Pemeriksaan/Bupati                 |
|   |   |   |     |                                   |  |     |           | Rekomendasi hasil reviu laporan kinerja tidak tepat                                   | ROO.2025.99.04.13 | Tim pemeriksa                                | Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam dan kekeliruan dalam mengambil kriteria audit                      |           |    | Rekomendasi tidak dapat diterapkan dan ditindaklanjuti                         | Objek Pemeriksaan, Bupati, Instansi      |
| 4 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal               | Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa    | 154 | Reviu Laporan Keuangan            | Jumlah Laporan Reviu Keuangan                    | 1   | Pelaporan | Laporan Hasi Reviu Laporan Keuangan tidak disusun tepat waktu                         | ROO.2025.99.04.14 | Irbanwil 3, Tim Pemeriksa                    | 1. OPD tidak menyusun Laporan Keuangan tepat waktu<br>2. Kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan             | internal  | C  | 1. Tidak mendapat predikat WTP<br>2. Citra Instansi buruk                      | Bupati                                   |
| 5 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal               | Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa    | 154 | Pengawasan Desa                   | Jumlah Laporan Pengawasan Desa                   | 23  | Pelaporan | Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Desa                             | ROO.2025.99.04.15 | Sub Bag Analisis dan Evaluasi, Tim Pemeriksa | Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal  | internal  | UC | Manfaat Hasil Pemeriksaan MenurunHas   | Objek Pemeriksaan/Bupati                 |
|   |   |   |     |                                   |  |     |           |   |                   | Tim Pemeriksa                                | tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan   | eksternal | C  | Terganggunya Proses Audit  | APIP/Bupati/masyarakat                   |
|   |   |   |     |                                   |  |     |           | Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan tugas Pengawasan Desa            | ROO.2025.99.04.16 | Tim Pemeriksa                                | Tekanan dari pihak-pihak tertentu  | eksternal | C  | Hasil Audit tidak menggambarkan Kondisi  | APIP/Bupati/masyarakat                   |
| 6 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 28  | Pelaporan | Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu           | ROO.2025.99.04.17 | Tim Pemeriksa                                | Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal  | internal  | C  | Manfaat Hasil Pemeriksaan Menurun Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi   | Objek Pemeriksaan/Bupati                 |
|   |   |   |     |                                   |  |     |           | Konflik kepentingan antara APIP dengan objek pemeriksaan (auditi)                     | ROO.2025.99.04.18 | Tim Pemeriksa/ Inspektur                     | 1. Kurangnya Integritas Pimpinan Inspektorat dan APIP<br>2. Lemahnya sistem pengendalian intern            | internal  | C  | 1. Kerugian keuangan daerah.<br>2. Reputasi Instansi.<br>3. Dampak hukum       | Instansi/ASN Perangkat Daerah            |
|   |   |   |     |                                   |  |     |           | Suap dari objek pemeriksaan (auditi)  | ROO.2025.99.04.19 | Tim Pemeriksa/ Inspektur                     | 1. Kurangnya Integritas Pejabat/oknum APIP<br>2. Lemahnya sistem pengendalian intern<br>3. Tekanan Ekonomi | internal  | C  | 1. Kerugian keuangan daerah.<br>2. Reputasi Instansi.<br>3. Dampak hukum       | Instansi/ASN Perangkat Daerah/masyarakat |
|   |   |   |     |                                   |  |     |           | Gratifikasi dari objek pemeriksaan (auditi)   | ROO.2025.99.04.20 | Tim Pemeriksa/ Inspektur                     | 1. Kurangnya Integritas Pejabat/oknum APIP/Auditi.<br>2. Pembeneran budaya ketimuran memberi hadiah        | internal  | C  | 1. Kerugian keuangan daerah.<br>2. Reputasi Instansi.<br>3. Dampak hukum       | APIP/Bupati/masyarakat                   |

|   |   |   |     |   |   |   |  |                   |                         |  |           |   |   |  |
|---|---|---|-----|---|---|---|--|-------------------|-------------------------|--|-----------|---|---|--|
|   |   |   |     |   |   |   | Pemerasan oleh oknum APIP kepada Auditi  | ROO.2025.99.04.21 | Tim Pemeriksa/Inspektur | 1. Kurangnya integritas pegawai<br>2. Kesempatan sebagai APIP/ pejabat berwenang<br>3. Tekanan Ekonomi     | internal  | C | 1. Dampak Kerugian Keuangan daerah<br>2. Dampak Budaya yang tidak Baik<br>3. Reputasi Instansi<br>4. Dampak Hukum | APIP/Bupati/masyarakat                   |
|   |   |   |     |   |   |   | penanganan pengaduan terhambat   | ROO.2025.99.04.22 | Tim Pemeriksa           | Data dukung/bukti awal tidak memadai   | eksternal | C | terhambatnya kegiatan pengawasan  | Masyarakat / APIP                        |
|   |   |   |     |   |   |   | Dokumen Pendukung Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tidak dapat didapatkan tepat waktu  | ROO.2025.99.04.23 | Tim Pemeriksa           | tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Obrik  | eksternal | C | Terganggunya Proses Audit   | APIP/Bupati/masyarakat                   |
|   |   |   |     |   |   |   | Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan tugas PDTT                          | ROO.2025.99.04.24 | Tim Pemeriksa           | Tekanan dari pihak-pihak tertentu  | eksternal | C | Hasil Audit tidak menggambarkan Kondisi sebenarnya  | APIP/Bupati/masyarakat                   |
|   |   |   |     |   |   |   | Kegagalan Auditor dalam mengidentifikasi Permasalahan dalam Audit Investigasi            | ROO.2025.99.04.25 | Tim Pemeriksa           | Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal  | internal  | C | Hasil Audit tidak dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan   | Obrik/Bupati                             |
| 7 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 2 | Konflik kepentingan antara APIP dengan objek pemeriksaan (auditi) dalam pelaksanaan PKKN | ROO.2025.99.04.26 | Tim Pemeriksa/Inspektur | 1. Kurangnya Integritas Pimpinan Inspektorat dan APIP<br>2. Lemahnya sistem pengendalian intern            | internal  | C | 1. Kerugian keuangan daerah.<br>2. Reputasi Instansi.<br>3. Dampak hukum  | Instansi/ASN Perangkat Daerah            |
|   |   |   |     |   |   |   | Suap dari objek pemeriksaan (auditi) dalam pelaksanaan PKKN                              | ROO.2025.99.04.27 | Tim Pemeriksa/Inspektur | 1. Kurangnya Integritas Pejabat/oknum APIP<br>2. Lemahnya sistem pengendalian intern<br>3. Tekanan Ekonomi | internal  | C | 1. Kerugian keuangan daerah.<br>2. Reputasi Instansi.<br>3. Dampak hukum  | Instansi/ASN Perangkat Daerah/masyarakat |
|   |   |   |     |   |   |   | Gratifikasi dari objek pemeriksaan (auditi) dalam pelaksanaan PKKN                       | ROO.2025.99.04.28 | Tim Pemeriksa/Inspektur | 1. Kurangnya Integritas Pejabat/oknum APIP/Auditi.<br>2. Pembenaan budaya ketimuran memberi hadiah         | internal  | C | 1. Kerugian keuangan daerah.<br>2. Reputasi Instansi.<br>3. Dampak hukum  | APIP/Bupati/masyarakat                   |
|   |   |   |     |   |   |   | Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah tidak tepat                                     | ROO.2025.99.04.29 | Tim Pemeriksa/Inspektur | Analisis tidak memadai da kapasitas SDM yang kurang  | internal  | C | Potensi kerugian negara tidak dapat ditarik   | APIP/Bupati/masyarakat                   |
|   |   |   |     |   |   |   | Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan tugas PKKN                          | ROO.2025.99.04.30 | Tim Pemeriksa           | Tekanan dari pihak-pihak tertentu  | eksternal | C | Hasil Audit tidak menggambarkan Kondisi sebenarnya  | APIP/Bupati/masyarakat                   |

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN ASISTENSI

|    |   |  |           |  |   |    |  |                   |                               |  |           |    |   |                        |
|----|---|--|-----------|--|---|----|--|-------------------|-------------------------------|--|-----------|----|---|------------------------|
| 7  | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Proseniase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang di tetapkan | 100       | Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengawasan                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun   | 3  | Tingginya beban kerja APIP   | ROO.2025.99.04.31 | Tim Audit/Sub Bag Perencanaan | Banyaknya penugasan mandatory  | eksternal | UC | Pelaksanaan PKPT kurang maksimal                            | APIP/Bupati/masyarakat |
|    |   |  |           |  |   |    | Penyusunan PPBR Tidak selesai tepat waktu  | ROO.2025.99.04.32 | Sub Bag Perencanaan           | tidak tersedianya data faktor Risiko Obrik   | eksternal | C  | Keterlambatan Penyusunan PKPT                               | APIP/Bupati/masyarakat |
|    |   |  |           |  |   |    | Konflik kepentingan antara APIP dengan Perangkat Daerah tertentu   | ROO.2025.99.04.33 | inspektur                     | 1. Kurangnya Integritas Inspektur<br>2. Kesempatan sebagai Pejabat Berwenang<br>3. Lemahnya sistem pengendalian intern |           | C  | 1. Dampak Budaya yang tidak Baik<br>2. Reputasi Instansi    | APIP/Bupati/masyarakat |
| 8  | Pendampingan dan Asistensi  | Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan MCP Korsupgah                                       | 4 Laporan | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah                    | 8  | Evidence SPIP yang tidak sesuai  | ROO.2025.99.04.34 | Irbanus                       | Kurangnya pemahaman Asesor Pemda dan OPD tentang SPIP  | eksternal | C  | Nilai Maturitas SPIP mengalami penurunan                    | APIP/Bupati/masyarakat |
| 9  |   | Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM                           | 5 Laporan | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 21 | Ketidaksesuaian Rencana Aksi dengan Rekomendasi Hasil evaluasi maupun dengan Indikator Kegiatan Utama General dan tema tematik | ROO.2025.99.04.35 | Irbanwil                      | Ketidakhahaman terhadap rekomendasi MenpanRB   | eksternal | C  | Rencana aksi tidak mempengaruhi capaian kinerja             | APIP/Bupati/masyarakat |
|    |   |  |           |  |   |    | Rencana Aksi tidak dilaksanakan tepat waktu  | ROO.2025.99.04.36 | Irbanwil                      | kurangnya komitmen perangkat daerah  | eksternal | C  | Pelaksanaan rencana aksi tidak mendukung pencapaian kinerja | APIP/Bupati/masyarakat |
|    |   |  |           |  |   |    | Laporan Evaluasi Internal Reformasi Birokras tidak disusun tepat waktu   | ROO.2025.99.04.37 | Irbanwil                      | Kurangnya pemahaman tim evaluator  | internal  | C  | Rekomendasi hasil evaluasi internal tidak dapat diterapkan  | APIP/Bupati/masyarakat |
| 10 |   |  |           | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas            | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan                       | 8  | Ketidaksesuaian dokumen Pendukung/ Evidence Penilaian Mandiri Zona Integritas  | ROO.2025.99.04.38 | Irban i                       | Kurangnya pemahaman tim pembangunan Zona Integritas (ZI) atas Lembar Kerja Evaluasi ZI                                 | internal  | C  | Dokumen bukti tidak diterima                                | APIP/Bupati/masyarakat |
|    |   |  |           |  |   |    | OPD tidak segera melaksanakan Perbaikan/tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB terkait Penilaian Zona Integritas           | ROO.2025.99.04.39 | Irban i                       | perbedaan tafsir antar tim Pembangunan Zona Integritas terkait rekomendasi Kemenpan RB                                 | internal  | C  | tidak ada perbaikan kondisi atas rekomendasi Kemenpan RB    | APIP/Bupati/masyarakat |



|    |                            |  |           |   |   |            |  |   |                   |             |  |          |   |  |                          |
|----|----------------------------|--|-----------|---|---|------------|--|---|-------------------|-------------|--|----------|---|--|--------------------------|
| 11 | Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM | 2 Laporan | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi | 4 Kegiatan |  | Terlambatnya Pemenuhan dokumen Pendukung/ Evidane penilaian MCP korsupgah | ROO.2025.99.04.40 | Irbanwil    | Kurangnya koordinasi Tim MCP Korsupgah                         | internal | C | Dokumen bukti tidak diterima                             | APIP/ Bupati/ masyarakat |
|    |                            |  |           |   |   |            |  | Manipulasi data penilaian   | ROO.2025.99.04.41 | Tim Penilai | 1. Kurangnya Integritas APIP dan OPD<br>2. Tekanan dari Atasan | internal | C | 1. Dampak Budaya yang tidak Baik<br>2. Reputasi Instansi | APIP/Bupati/masyarakat   |
|    |                            |  |           |   |   |            |  | Dokumen Bukti tidak sesuai dengan permintaan verifikator                  | ROO.2025.99.04.42 | Irbanwil    | Kurangnya koordinasi Tim MCP Korsupgah                         | internal | C | Dokumen bukti tidak diterima                             | APIP/ Bupati/ masyarakat |

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

|    |  |  |         |   |   |          |  |   |                   |                     |  |           |    |  |                      |
|----|--|--|---------|---|---|----------|--|---|-------------------|---------------------|--|-----------|----|--|----------------------|
| 12 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Presentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan | 100,00% | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Inspektorat Daerah     | 3        |  | Dokumen perencanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan  | ROO.2025.99.04.43 | Sub Bag Perencanaan | Pedoman yang dinamis   | eksternal | UC | Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan   | ASN Perangkat Daerah |
|    |  |  |         |   |   |          |  | Keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan      | ROO.2025.99.04.44 | Sub Bag Perencanaan | data yang belum lengkap  | Internal  | C  | Manfaat menurun  | Instansi             |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen laporan disusun   |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 10       |  | Data kinerja tidak valid                                | ROO.2025.99.04.45 | Sub Bag Perencanaan | Data tidak akurat  | Internal  | C  | Pengambilan Keputusan kurang tepat   | Instansi             |
|    |  |  |         |   |   |          |  | Keterlambatan dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja | ROO.2025.99.04.46 | Sub Bag Perencanaan | data yang belum lengkap  | Internal  | C  | Manfaat menurun  | Instansi             |
| 13 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan         | 100,00% | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 48 Orang |  | Kesalahan data kepegawaian                              | ROO.2025.99.04.47 | Sub Bag Adum        | Data kepegawaian yang tidak diupdate secara berkala  | Internal  | C  | Keterlambatan penyesuaian data kepegawaian   | ASN Perangkat Daerah |
|    |  |  |         |   |   |          |  | Manipulasi data presensi pegawai ASN                    | ROO.2025.99.04.48 | Sub Bag Adum        | 1. Kurangnya Integritas Pegawai.<br>2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain.<br>3. Tekanan ekonomi | internal  | C  | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah<br>2. Dampak Budaya yang tidak Baik<br>3. Target kinerja tidak tercapai<br>4. Reputasi Institusi tidak baik | ASN Perangkat Daerah |
|    |  |  |         |   |   |          |  | Manipulasi data e-kinerja pegawai ASN                   | ROO.2025.99.04.49 | Sub Bag Adum        | 1. Kurangnya Integritas Pegawai.<br>2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain.<br>3. Tekanan ekonomi | internal  | C  | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah<br>2. Dampak Budaya yang tidak Baik<br>3. Target kinerja tidak tercapai<br>4. Reputasi Institusi tidak baik | ASN Perangkat Daerah |

|    |  |   |          |   |   |            |  |  |                   |              |   |           |   |  |                               |
|----|--|---|----------|---|---|------------|--|--|-------------------|--------------|---|-----------|---|--|-------------------------------|
|    |  |   |          | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen |  | SPJ Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan realisasi       | ROO.2025.99.04.50 | Sub Bag Adum | 1. Kurangnya Integritas Pegawai.<br>2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain.<br>3. Tekanan ekonomi<br>4. Tekanan dari atasan<br>5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian Internal)<br>6. Kebijakan tidak didukung dengan anggaran | Internal  | C | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah<br>2. Dampak Budaya yang tidak Baik<br>3. Resiko Hukum<br>4. Reputasi tidak baik<br>5. Temuan Pemeriksaan | ASN Perangkat Daerah          |
|    |  |   |          |   |   |            |  | Perjalanan Dinas Fiktif                                  | ROO.2025.99.04.51 | Sub Bag Adum | 1. Kurangnya Integritas Pegawai.<br>2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain.<br>3. Tekanan ekonomi<br>4. Tekanan dari atasan<br>5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian Internal)<br>6. Kebijakan tidak didukung dengan anggaran | internal  | C | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah<br>2. Dampak Budaya yang tidak Baik<br>3. Resiko Hukum<br>4. Reputasi tidak baik<br>5. Temuan Pemeriksaan | ASN Perangkat Daerah          |
|    | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah               | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai kebutuhan        |          | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 48         |  | Ketidaksesuaian Kompetensi Diklat dengan Kebutuhan       | ROO.2025.99.04.52 | Sub Bag Adum | Analisis kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan kurang tepat  | eksternal | C | Kompetensi tidak meningkat   | Instansi, APIP                |
|    |  |   |          |   |   |            |  | Diklat fiktif  | ROO.2025.99.04.53 |              | 1. Peluang<br>2. Tekanan ekonomi<br>3. Integritas Pegawai   | internal  | C | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah<br>2. Dampak Budaya yang tidak Baik<br>3. Temuan Pemeriksaan  | ASN Perangkat Daerah          |
| 14 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Tertelaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor                | 12 Bulan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              | Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan                                  | 9 Paket    |  | Penganggaran tidak sesuai kebutuhan                      | ROO.2025.99.04.54 | Sub Bag Adum | stock opname persediaan ATK tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan   | Internal  | C | Jumlah ATK tidak sesuai  | ASN Perangkat Daerah          |
|    |  |   |          | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                 | 12 Laporan |  | Manipulasi jumlah peserta rapat                          | ROO.2025.99.04.55 | Sub Bag Adum | 1. Peluang<br>2. Tekanan ekonomi<br>3. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain.  | Internal  | C | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah<br>2. Dampak Budaya yang tidak Baik<br>3. Temuan Pemeriksaan  | ASN Perangkat Daerah          |
|    |  |   |          |   |   |            |  | Manipulasi saldo persediaan ATK                          | ROO.2025.99.04.56 | Sub Bag Adum | 1. Peluang<br>2. Tekanan ekonomi<br>3. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain.  | Internal  | C | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah<br>2. Dampak Budaya yang tidak Baik<br>3. Temuan Pemeriksaan  | Instansi/ASN Perangkat Daerah |
| 15 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100,00%  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan                             | 1 Paket    |  | Keterlambatan proses pengadaan                           | ROO.2025.99.04.57 | Sub Bag Adum | Keterlambatan penyusunan dokumen pengadaan/persyaratan pengadaan  | Internal  | C | Pemanfaatan barang yang kurang optimal   | Instansi/ASN Perangkat Daerah |
|    |  |   |          |   |   |            |  | Kualitas barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan | ROO.2025.99.04.58 | Sub Bag Adum | Pejabat pengadaan tidak memeriksa kesesuaian barang diterima  | Internal  | C | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah<br>2. Dampak Budaya yang tidak Baik<br>3. Dampak Reputasi yang tidak baik                                 | Instansi/ASN Perangkat Daerah |
|    |  |   |          |   |   |            |  | Mark up harga  | ROO.2025.99.04.59 | Sub Bag Adum | 1. Kurangnya Integritas Pegawai.<br>2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain.<br>3. Tekanan ekonomi  | Internal  | C | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah<br>2. Dampak Budaya yang tidak Baik<br>3. Dampak Reputasi yang tidak baik                                 | Instansi/ASN Perangkat Daerah |
|    |  |   |          |   |   |            |  | Pengadaan fiktif   | ROO.2025.99.04.60 | Sub Bag Adum | 1. Kurangnya Integritas Pegawai.<br>2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain.<br>3. Tekanan ekonomi  | Internal  | C | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah<br>2. Dampak Budaya yang tidak Baik<br>3. Dampak Reputasi yang tidak baik                                 | Instansi/ASN Perangkat Daerah |

|    |   |  |          |   |   |                                       |                                       |  |                   |                     |   |           |    |  |                               |
|----|---|--|----------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---|-----------|----|--|-------------------------------|
|    | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah                             | Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan           |          | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah  | 2                                     |                                       | Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi         | ROO.2025.99.04.61 | Sub Bag Adum        | 1. Kurangnya pemantauan terhadap pemakai BMD<br>2. Pembenaan bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. | internal  | C  | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah<br>2. Dampak Budaya yang tidak Baik | Instansi/ASN Perangkat Daerah |
| 16 | Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah                  | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            | 12 bulan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan                            |                                       | Keterlambatan pemenuhan penggajian PTT               | ROO.2025.99.04.62 | Sub Bag Perencanaan | Keterlambatan pengajuan GU  | eksternal | UC | Hak PTT tidak terpenuhi  | ASN Perangkat Daerah          |
|    |   |  |          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 12 Laporan                            |                                       | Keterlambatan dalam pembayaran tagihan               | ROO.2025.99.04.63 | Sub Bag Adum        | Besarnya tagihan listrik yang sulit terprediksi dan Keterlambatan tagihan internet  | eksternal | UC | koneksi internet yang kurang cepat                                     | ASN Perangkat Daerah          |
| 17 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara | 12 Unit  | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>3. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi | 1. 23 unit<br>2. 58 unit<br>3. 1 unit | 1. 23 unit<br>2. 58 unit<br>3. 1 unit | Rincian anggaran yang disusun tidak sesuai kebutuhan | ROO.2025.99.04.64 | Sub Bag Adum        | Banyaknya aset yang harus dipelihara  | Internal  | UC | Pemeliharaan barang tidak sesuai kebutuhan                             | ASN Perangkat Daerah          |

**Kertas Kerja**  
**Hasil Analisis Risiko**

| Nama Pemda<br>Tahun Penilaian<br>Tujuan Strategis |  | Pemerintah Kabupaten Purbalingga<br>2025<br>Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah<br>Kabupaten Purbalingga<br>Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah<br>Urusan Pengawasan |                |                      |                    |
|---|--|--|----------------|----------------------|--------------------|
| Urusan Pemerintahan                               |  | Analisis Risiko  |                |                      |                    |
| No.   | "Risiko" yang Teridentifikasi  | Kode Risiko  | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko f=dxe |
| a   | b  | c  | d              | e                    | f=dxe              |
| <b>I Risiko Strategis</b>                         |  |  |                |                      |                    |
| 1   | OPD Belum melakukan Penilaian Risiko Strategis dan Operasional   | RSO.2025.99.04.01  | 3              | 2                    | 6                  |
| 2   | OPD Belum memetakan Potensi Kecurangan / Potensi terjadinya Korupsi  | RSO.2025.99.04.02  | 3              | 3                    | 9                  |
| 3   | OPD Belum menyusun Rencana Mitigasi Risiko maupun potensi kecurangan   | RSO.2025.99.04.03  | 3              | 2                    | 6                  |
| 4   | OPD dan Pemda terlambat dalam melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi                                       | RSO.2025.99.04.04  | 3              | 3                    | 9                  |
| 5   | Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi tidak dilaksanakan tepat waktu                          | RSO.2025.99.04.05  | 3              | 2                    | 6                  |
| 6   | Keterlambatan Obrik dalam penyelesaian tidaklanjut Hasil Pemeriksaan   | RSO.2025.99.04.06  | 3              | 1                    | 3                  |
| 7   | Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tidak dilaksanakan Tepat Waktu  | RSO.2025.99.04.07  | 3              | 3                    | 9                  |
| 8   | Pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian Risiko Fraud belum dilaksanakan secara berkala                           | RSO.2025.99.04.08  | 4              | 2                    | 8                  |
| 9   | Kasus Gratifikasi meningkat  | RSO.2025.99.04.09  | 3              | 3                    | 9                  |
| 10  | Pegawai tidak memanfaatkan saluran whistleblowing karena masih tidak percaya mekanisme perlindungan pelapor berjalan | RSO.2025.99.04.10  | 4              | 3                    | 12                 |
| 11  | Terlambatnya Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu   | RSO.2025.99.04.11  | 3              | 3                    | 9                  |
| 12  | Pelayanan yang diberikan tidak efektif dan tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.                                | RSO.2025.99.04.12  | 4              | 1                    | 4                  |
| 13  | Munculnya resistensi terhadap perubahan budaya organisasi  | RSO.2025.99.04.13  | 4              | 2                    | 8                  |
| 14  | tidak terselesaikannya Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP   | RSO.2025.99.04.14  | 3              | 2                    | 6                  |
| <b>III Risiko Operasional OPD 1: ...</b>          |  |  |                |                      |                    |
| 1   | Keterlambatan penyusunan laporan ikhtisar  | ROO.2025.99.04.01  | 2              | 1                    | 2                  |
| 2   | Ketidaksesuaian dokumen tindaklanjut dengan Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP                                   | ROO.2025.99.04.02  | 3              | 3                    | 9                  |
| 3   | Kurang tertibnya pengarsipan dokumentindak lanjut  | ROO.2025.99.04.03  | 3              | 2                    | 6                  |
| 4   | Rekomendasi APIP sudah tidak relevan untuk ditindaklanjuti   | ROO.2025.99.04.04  | 4              | 1                    | 4                  |
| 5   | Keterlambatannya Penyusunan LH Pengawasan Kinerja  | ROO.2025.99.04.05  | 3              | 3                    | 9                  |
| 6   | Dokumen Pendukung Pengawasan Kinerja tidak dapat diperoleh tepat waktu   | ROO.2025.99.04.06  | 4              | 3                    | 12                 |
| 7   | Rekomendasi hasil pengawasan laporan kinerja tidak tepat   | ROO.2025.99.04.07  | 3              | 3                    | 9                  |
| 8   | Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Keuangan  | ROO.2025.99.04.08  | 4              | 3                    | 12                 |
| 9   | Dokumen pendukung kegiatan pengawasan keuangan tidak didapatkan tepat waktu  | ROO.2025.99.04.09  | 3              | 3                    | 9                  |
| 10  | Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam  | ROO.2025.99.04.10  | 4              | 1                    | 4                  |
| 11  | Kesalahan dalam Penetapan Jumlah Objek, ruang lingkup dan sasaran Pengawasan internal                                | ROO.2025.99.04.11  | 3              | 1                    | 3                  |
| 12  | Keterlambatan Penyusunan LHR Kinerja   | ROO.2025.99.04.12  | 3              | 1                    | 3                  |
| 13  | Rekomendasi hasil reuiu laporan kinerja tidak tepat  | ROO.2025.99.04.13  | 4              | 1                    | 4                  |
| 14  | Laporan Hasi Reuiu Laporan Keuangan tidak disusun tepat waktu  | ROO.2025.99.04.14  | 4              | 1                    | 4                  |
| 15  | Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Desa  | ROO.2025.99.04.15  | 2              | 2                    | 4                  |
| 16  | Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan tugas Pengawasan Desa   | ROO.2025.99.04.16  | 4              | 1                    | 4                  |
| 17  | Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu  | ROO.2025.99.04.17  | 4              | 1                    | 4                  |
| 18  | Konflik kepentingan antara APIP dengan objek pemeriksaan (auditi)  | ROO.2025.99.04.18  | 4              | 2                    | 8                  |
| 19  | Suap dari objek pemeriksaan (auditi)   | ROO.2025.99.04.19  | 4              | 1                    | 4                  |
| 20  | Gratifikasi dari objek pemeriksaan (auditi)  | ROO.2025.99.04.20  | 4              | 2                    | 8                  |
| 21  | Pemerasan oleh oknum APIP kepada Auditi  | ROO.2025.99.04.21  | 4              | 1                    | 4                  |
| 22  | penanganan pengaduan terhambat   | ROO.2025.99.04.22  | 3              | 1                    | 3                  |
| 23  | Dokumen Pendukung Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tidak dapat didapatkan tepat waktu                              | ROO.2025.99.04.23  | 4              | 1                    | 4                  |
| 24  | Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan tugas PDTT  | ROO.2025.99.04.24  | 4              | 2                    | 8                  |
| 25  | Kegagalan Auditor dalam mengidentifikasi Permasalahan dalam Audit Investigasi  | ROO.2025.99.04.25  | 4              | 1                    | 4                  |

|    |  |                   |   |   |    |
|----|--|-------------------|---|---|----|
| 26 | Konflik kepentingan antara APIP dengan objek pemeriksaan (auditi) dalam pelaksanaan PKKN                                       | ROO.2025.99.04.26 | 4 | 1 | 4  |
| 27 | Suap dari objek pemeriksaan (auditi) dalam pelaksanaan PKKN  | ROO.2025.99.04.27 | 4 | 1 | 4  |
| 28 | Gratifikasi dari objek pemeriksaan (auditi) dalam pelaksanaan PKKN   | ROO.2025.99.04.28 | 3 | 1 | 3  |
| 29 | Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah tidak tepat   | ROO.2025.99.04.29 | 4 | 1 | 4  |
| 30 | Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan tugas PKKN  | ROO.2025.99.04.30 | 4 | 1 | 4  |
| 31 | Tingginya beban kerja APIP   | ROO.2025.99.04.31 | 3 | 4 | 12 |
| 32 | Penyusunan PPBR Tidak selesai tepat waktu  | ROO.2025.99.04.32 | 3 | 1 | 3  |
| 33 | Konflik kepentingan antara APIP dengan Perangkat Daerah tertentu   | ROO.2025.99.04.33 | 4 | 1 | 4  |
| 34 | Evidence SPIP yang tidak sesuai  | ROO.2025.99.04.34 | 3 | 3 | 9  |
| 35 | Ketidaksesuaian Rencana Aksi dengan Rekomendasi Hasil evaluasi maupun dengan Indikator Kegiatan Utama General dan tema tematik | ROO.2025.99.04.35 | 3 | 3 | 9  |
| 36 | Rencana Aksi tidak dilaksanakan tepat waktu  | ROO.2025.99.04.36 | 3 | 2 | 6  |
| 37 | Laporan Evaluasi Internal Reformasi Birokras tidak disusun tepat waktu   | ROO.2025.99.04.37 | 3 | 2 | 6  |
| 38 | Ketidaksesuaian dokumen Pendukung/ Evidance Penilaian Mandiri Zona Integritas  | ROO.2025.99.04.38 | 3 | 3 | 9  |
| 39 | OPD tidak segera melaksanakan Perbaikan/tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB terkait Penilaian Zona Integritas           | ROO.2025.99.04.39 | 3 | 3 | 9  |
| 40 | Terlambatnya Pemenuhan dokumen Pendukung/ Evidane penilaian MCP korsupgah  | ROO.2025.99.04.40 | 3 | 1 | 3  |
| 41 | Manipulasi data penilaian  | ROO.2025.99.04.41 | 4 | 1 | 4  |
| 42 | Dokumen Bukti tidak sesuai dengan permintaan verifikator   | ROO.2025.99.04.42 | 4 | 1 | 4  |
| 43 | Dokumen perencanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan   | ROO.2025.99.04.43 | 3 | 2 | 6  |
| 44 | Keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan   | ROO.2025.99.04.44 | 4 | 1 | 4  |
| 45 | Data kinerja tidak valid   | ROO.2025.99.04.45 | 4 | 1 | 4  |
| 46 | Keterlambatan dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja  | ROO.2025.99.04.46 | 3 | 1 | 3  |
| 47 | Kesalahan data kepegawaian   | ROO.2025.99.04.47 | 3 | 1 | 3  |
| 48 | Manipulasi data presensi pegawai ASN   | ROO.2025.99.04.48 | 3 | 1 | 3  |
| 49 | Manipulasi data e-kinerja pegawai ASN  | ROO.2025.99.04.49 | 3 | 3 | 9  |
| 50 | SPJ Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan realisasi   | ROO.2025.99.04.50 | 3 | 1 | 3  |
| 51 | Perjalanan Dinas Fiktif  | ROO.2025.99.04.51 | 3 | 1 | 3  |
| 52 | Ketidaksesuaian Kompetensi Diklat dengan Kebutuhan   | ROO.2025.99.04.52 | 2 | 1 | 2  |
| 53 | Diklat fiktif  | ROO.2025.99.04.53 | 2 | 1 | 2  |
| 54 | Penganggaran tidak sesuai kebutuhan  | ROO.2025.99.04.54 | 4 | 1 | 4  |
| 55 | Manipulasi jumlah peserta rapat  | ROO.2025.99.04.55 | 1 | 1 | 1  |
| 56 | Manipulasi saldo persediaan ATK  | ROO.2025.99.04.56 | 1 | 1 | 1  |
| 57 | Keterlambatan proses pengadaan   | ROO.2025.99.04.57 | 3 | 3 | 9  |
| 58 | Kualitas barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan   | ROO.2025.99.04.58 | 4 | 1 | 4  |
| 59 | Mark up harga  | ROO.2025.99.04.59 | 4 | 1 | 4  |
| 60 | Pengadaan fiktif   | ROO.2025.99.04.60 | 4 | 1 | 4  |
| 61 | Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi   | ROO.2025.99.04.61 | 3 | 3 | 9  |
| 62 | Keterlambatan pemenuhan penggajian PTT   | ROO.2025.99.04.62 | 3 | 1 | 3  |
| 63 | Keterlambatan dalam pembayaran tagihan   | ROO.2025.99.04.63 | 2 | 1 | 2  |
| 64 | Rincian anggaran yang disusun tidak sesuai kebutuhan   | ROO.2025.99.04.64 | 4 | 1 | 4  |

Kertas Kerja  
Daftar Risiko Prioritas

| Nama Pemda<br>Tahun Penilaian<br>Tujuan Strategis |  | : Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga<br>2025<br>Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga |              |                               |  |   |
|---|--|--|--------------|-------------------------------|--|---|
| Urusan Pemerintahan                               |  | Urusan pengawasan  |              |                               |  |   |
| No  | Risiko Prioritas   | Kode Risiko  | Skala Risiko | Pemilik Risiko                | Penyebab   | Dampak  |
| a   | b  | c  | d            | e                             | f  | g   |
| <b>II Risiko Strategis</b>                        |  |  |              |                               |  |   |
| 1   | OPD Belum memetakan Potensi Kecurangan / Potensi terjadinya Korupsi  | RSO.2025.99.04.02  | 9            | Inspektur                     | Kurang masifnya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Risiko                                 | tidak terantisipasinya tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian daerah     |
| 2   | OPD dan Pemda terlambat dalam melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi   | RSO.2025.99.04.04  | 9            | Inspektur                     | Koordinasi antar tim Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi tidak berjalan dengan baik    | Penjaminan Kualitas atas PM SPIP terlambat  |
| 3   | Keterlambatan Obrik dalam penyelesaian tidaklanjut Hasil Pemeriksaan   | RSO.2025.99.04.07  | 9            | Inspektur                     | Kurangnya Komitmen Pimpinan OPD dalam penyelesaian Tindaklanjut                        | terhambatnya proses penyelesaian potensi kerugian negara                          |
| 4   | Pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian Risiko Fraud belum dilaksanakan secara berkala                                     | RSO.2025.99.04.09  | 9            | Inspektur                     | Kurangnya kesadaran manajemen perangkat daerah dalam pengelolaan risiko fraud          | Potensi kejadian fraud meningkat  |
| 5   | Pegawai tidak memanfaatkan saluran whistleblowing karena masih tidak percaya mekanisme perlindungan pelapor berjalan           | RSO.2025.99.04.11  | 9            | Irbansus                      | Kepercayaan terhadap mekanisme perlindungan pelapor kurang                             | Meningkatnya potensi kejadian korupsi dan penyalahgunaan wewenang                 |
| <b>III Risiko Operasional</b>                     |  |  |              |                               |  |   |
| <b>PENGAWASAN INTERNAL</b>                        |  |  |              |                               |  |   |
| 6   | Dokumen Pendukung Pengawasan Kinerja tidak dapat diperoleh tepat waktu   | ROO.2025.99.04.06  | 12           | Inspektur                     | Tidak tertibnya pencatatan dan pengelolaan keuangan obrik                              | Terganggunya proses audit   |
| 7   | Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Keuangan  | ROO.2025.99.04.08  | 12           | Tim Pemeriksa                 | Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal  | Hasil Pemeriksaan kurang bermanfaat<br>Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi |
| 8   | Ketidaksesuaian dokumen tindaklanjut dengan Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP   | ROO.2025.99.04.02  | 9            | Sub Bag Analisis dan Evaluasi | Pemahaman Obrik atas Rekomendasi Audit   | dokumen tindaklanjut tidak dapat diterima   |
| 9   | Keterlambatannya Penyusunan LH Pengawasan Kinerja  | ROO.2025.99.04.05  | 9            | Irbansus                      | Penyusunan program kerja audit tidak handal  | Hasil Pemeriksaan kurang bermanfaat<br>Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi |
| 10  | Rekomendasi hasil pengawasan laporan kinerja tidak tepat   | ROO.2025.99.04.07  | 9            | Tim pemeriksa                 | Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam dan kekeliruan dalam mengambil kriteria audit  | Rekomendasi tidak dapat diterapkan dan ditindaklanjuti                            |
| 11  | Dokumen pendukung kegiatan pengawasan keuangan tidak didapatkan tepat waktu  | ROO.2025.99.04.09  | 9            | Tim Pemeriksa                 | tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Obrik                              | Terganggunya Proses Audit   |
| <b>PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                 |  |  |              |                               |  |   |
| 14  | Tingginya beban kerja APIP   | ROO.2025.99.04.31  | 12           | Tim Audit/Sub Bag Perencanaan | Banyaknya penugasan mandatory  | Pelaksanaan PKPT kurang maksimal  |
| 15  | Evidence SPIP yang tidak sesuai  | ROO.2025.99.04.34  | 9            | Irbansus                      | Kurangnya pemahaman Asesor Pemda dan OPD tentang SPIP                                  | Nilai Maturitas SPIP mengalami penurunan  |
| 16  | Ketidaksesuaian Rencana Aksi dengan Rekomendasi Hasil evaluasi maupun dengan Indikator Kegiatan Utama General dan tema tematik | ROO.2025.99.04.35  | 9            | Irbansus                      | Ketidakhahaman terhadap rekomendasi MenpanRB   | Rencana aksi tidak mempengaruhi capaian kinerja                                   |
| 17  | Ketidaksesuaian dokumen Pendukung/ Evidance Penilaian Mandiri Zona Integritas  | ROO.2025.99.04.38  | 9            | Irbansus                      | Kurangnya pemahaman tim pembangunan Zona Integritas (ZI) atas Lembar Kerja Evaluasi ZI | Dokumen bukti tidak diterima  |
| 18  | OPD tidak segera melaksanakan Perbaikan/tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB terkait Penilaian Zona Integritas           | ROO.2025.99.04.39  | 9            | Irbansus                      | perbedaan tafsir antar tim Pembangunan Zona Integritas terkait rekomendasi Kemenpan RB | tidak ada perbaikan kondisi atas rekomendasi Kemenpan RB                          |
| <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>         |  |  |              |                               |  |   |

|    |  |                   |   |              |  |  |
|----|--|-------------------|---|--------------|--|--|
| 19 | Manipulasi data e-kinerja pegawai ASN        | ROO.2025.99.04.49 | 9 | Sub Bag Adum | 1. Kurangnya Integritas Pegawai.<br>2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain.<br>3. Tekanan ekonomi | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah<br>2. Dampak Budaya yang tidak Baik<br>3. Target kinerja tidak tercapai<br>4. Reputasi Institusi tidak baik |
| 20 | Keterlambatan proses pengadaan               | ROO.2025.99.04.57 | 9 | Sub Bag Adum | Keterlambatan penyusunan dokumen pengadaan/persyatan dokumen pengadaan   | Pemanfaatan barang yang kurang optimal   |
| 21 | Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi | ROO.2025.99.04.61 | 9 | Sekretaris   | 1. Kurangnya pemantauan terhadap pemakai BMD<br>2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain.           | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah<br>2. Dampak Budaya yang tidak Baik   |

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian  
( RTP atas CEE)**

**Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga  
Tahun Penilaian : 2025**

| No.  | Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai   | Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian   | Penanggung jawab             | Target Waktu Penyelesaian | Realisasi Penyelesaian |
|--|---|---|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| a  | b   | c   | d                            | e                         | f                      |
| <b>I PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b> |   |   |                              |                           |                        |
| 1  | <p>a. Masih terdapat temuan atas LHP BPK terkait Pengamanan Aset Daerah yang masih berulang atau belum tuntas</p> <p>b. Pemantauan atas RTP belum dilakukan secara berkala/periodik, sebagian besar sebatas jika ada instruksi/arahan. Penilaian risiko fraud belum sepenuhnya menghasilkan peta risiko korupsi</p>   | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Aset, Persediaan, dan Kas Opname pada Perangkat Daerah   | Irbawil 1, 2, 3              | Januari 2025              |                        |
|  |   | Reviu Rencana Tindak Pengendalian OPD Tahun 2025 dan Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 2024    | Irbawil 1, 2, 4              | Maret 2025                |                        |
|  |   | Pendampingan Penilaian Risiko Kecurangan  | Irbansus                     | Januari 2025              |                        |
|  |   | Reviu Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2025                                     | Irbawil 1, 2, 3 dan Irbansus | Tribulan II dan III       |                        |
|  | <p>a. Pelaksanaan Audit Ketaatan (Compliance Audit) belum sepenuhnya menyusun/ mengembangkan langkah kerja pengawasan yang mempertimbangkan risiko-risiko strategis yang ada pada objek pengawasan</p> <p>b. Jasa Konsultasi yang diberikan Inspektorat belum seluruh nya mengarah pada pembunaa kepada perangkat daerah yang masih memiliki tingkat kematangan MR yang rendah maupun perangkat daerah yang belum memiliki Register Risiko/Profil Risiko, sehingga layanan konsultasi belum mampu memberikan perbaikan terhadap pengelolaan risiko di Lingkungan Pemkab Purbalingga</p> | Peningkatan Kapasitas SDM APIP dengan melaksanakan Diklat, Bimtek dan <i>Inhouse Training</i> | Sekretaris                   | Semester 1 dan 2          |                        |



**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan  
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

| <b>Nama Pemda</b>          |  | Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga  |  |  |                                 |                           |
|----------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Tahun Penilaian</b>     |  | 2025   |  |  |                                 |                           |
| <b>Tujuan Strategis</b>    |  | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga<br>Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah |  |  |                                 |                           |
| <b>Urusan Pemerintahan</b> |  | Urusan Pengawasan  |  |  |                                 |                           |
| No                         | Risiko Prioritas   | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)  | Celah Pengendalian   | Rencana Tindak Pengendalian  | Pemilik/ Penanggung Jawab       | Target Waktu Penyelesaian |
| a                          | b  | d  | e  | f  | g                               | h                         |
| <b>I Risiko Strategis</b>  |  |  |  |  |                                 |                           |
| 1                          | OPD Belum memetakan Potensi Kecurangan / Potensi terjadinya Korupsi                        | Perbup Pedoman Pengelolaan Risiko, Perbup Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah  | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko teridentifikasi | Pendampingan identifikasi potensi kecurangan                             | Irbansus                        | Januari 2025              |
| 2                          | OPD dan Pemda terlambat dalam melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi             | 1. Telah dilaksanakan Sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP<br>2. Telah dibentuk Tim Asesor OPD dan Pemda<br>3. Telah dibentuk Satgas SPIP    | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko teridentifikasi | Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi                         | Irbansus II                     | April 2025                |
| 3                          | Keterlambatan Obrik dalam penyelesaian tidak lanjut Hasil Pemeriksaan                      | Telah disusun Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Kabupaten Purbalingga  | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko teridentifikasi | Pendampingan dan Konsultasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan | Irbansus I, II, III Sekretariat | Setiap bulan              |
| 4                          | Pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian Risiko Fraud belum dilaksanakan secara berkala | Perbup Pedoman Pengelolaan Risiko, Perbup FCP  | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko teridentifikasi | Evaluasi atas Rencana Tindak Pengendalian risiko <i>fraud</i> OPD        | Irbansus                        | Tribulan I                |

|                              |  |  |  |  |                                  |                       |
|------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|-----------------------|
| 5                            | Pegawai tidak memanfaatkan saluran whistleblowing karena masih tidak percaya mekanisme perlindungan pelapor berjalan | Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan ( <i>Whistle Blowing System</i> ) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Purbalingga | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko teridentifikasi       | Sosialisasi Perbup Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan                      | Irbansus                         | Februari 2025         |
| <b>II Risiko Operasional</b> |  |  |  |  |                                  |                       |
| <b>PENGAWASAN INTERNAL</b>   |  |  |  |  |                                  |                       |
| 6                            | Dokumen Pendukung Pengawasan Kinerja tidak dapat diperoleh tepat waktu   | Koordinasi intensif dengan OPD Terkait sebelum pemeriksaan dilaksanakan  | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Mendorong partisipasi aktif pimpinan auditee selama proses pengawasan kinerja  | Irbansus, Tim Pemeriksa          | Setiap awal penugasan |
| 7                            | Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Keuangan  | Pemantauan secara berkala Progres Penyelesaian LHP Secara Online   | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Mengirimkan peserta Diklat terkait pengawasan keuangan                         | Irbansus, Inspektur              | Semester 1            |
| 8                            | Ketidaksesuaian dokumen tindak lanjut dengan Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP                                  | Telah disusun Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Kabupaten Purbalingga                                  | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Pendampingan/ desk pada OPD tindak lanjut hasil pemeriksaan                    | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi | Triwulan IV           |
| 9                            | Keterlambatannya Penyusunan LH Pengawasan Kinerja  | 1. Pemantauan secara berkala Progres Penyelesaian LHP Secara Online<br>2. SOP dan Standar Pelayanan Pengawasan Keuangan  | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Mengirimkan peserta diklat audit kinerja                                       | Inspektur                        | Semester 1            |
| 10                           | Rekomendasi hasil pengawasan laporan kinerja tidak tepat   | 1. Reviu berjenjang oleh pimpinan<br>2. SOP dan Standar Pelayanan Pengawasan Kinerja   | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Peningkatan kompetensi bagi tim pemeriksa/auditor                              | Sekretaris                       | Triwulan I, II, III   |
| 11                           | Dokumen pendukung kegiatan pengawasan keuangan tidak didapatkan tepat waktu  | 1. Pemantauan secara berkala Progres Penyelesaian LHP Secara Online<br>2. SOP dan Standar Pelayanan Pengawasan Keuangan  | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Mendorong partisipasi aktif pimpinan auditee selama proses pengawasan keuangan | Tim Pemeriksa                    | Setiap awal penugasan |

| <b>PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>         |  |  |   |   |                                  |               |
|---|--|--|---|---|----------------------------------|---------------|
| 12  | Tingginya beban kerja APIP   | Anjab dan ABK  | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Menyusun roadmap pemenuhan SDM APIP sesuai dengan rekomendasi/anjab ABK dan menyampaikan usulan pemenuhan SDM APIP ke Bupati    | Tim Peningkatan Kapabilitas APIP | Triwulan II   |
| 13  | Evidence SPIP yang tidak sesuai  | 1. Telah dibentuk Tim Asesor OPD dan Pemda<br>2. Rapat Koordinasi  | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Menyusun daftar Evidence pemenuhan PM SPIP  | Tim Pendampingan SPIP            | Triwulan II   |
| 14  | Ketidaksesuaian Rencana Aksi dengan Rekomendasi Hasil evaluasi maupun dengan Indikator Kegiatan Utama General dan tema tematik | 1. telah dibentuk Tim RB Kabupaten<br>2. Rapat Koordinasi  | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Pendampingan/ desk penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB)   | Irbansus                         | Triwulan II   |
| 15  | Ketidaksesuaian dokumen Pendukung/ Evidence Penilaian Mandiri Zona Integritas  | 1. terdapat tim pembangunan zona Integritas Unit Kerja<br>2. Telah dibentuk Tim Penilai Internal                                 | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Pendampingan Persiapan Penilaian Zona Integritas  | Irbansus                         | Februari 2025 |
| 16  | OPD tidak segera melaksanakan Perbaikan/tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB   | 1. terdapat tim pembangunan zona Integritas Unit Kerja<br>2. Telah dibentuk Tim Penilai Internal                                 | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Internal dan Tim Pembangunan zona Integritas Unit   | Irbansus                         | Maret 2025    |
| <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b> |  |  |   |   |                                  |               |
| 17  | Manipulasi data e-kinerja pegawai ASN  | 1. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.<br>2. Perbup No. 36 Tahun 2022 tentang TPP.<br>3. Bukti penugasan individu bulanan | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS.<br>2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin<br>3. Pemberian reward | Sekretaris                       | Setiap Bulan  |
| 18  | Keterlambatan proses pengadaan   | 1. Penunjukan Pejabat Pengadaan<br>2. Terdapat Rencana Umum Pengadaan  | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Rapat Koordinasi rencana pengadaan  | Pejabat Pengadaan dan Ppkom      | Triwulan I    |

|    |  |   |   |  |           |            |
|----|--|---|---|--|-----------|------------|
| 19 | Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbup No. 71 Tahun 2020 tentang pengelolaan BMD</li><li>2. SK Pemegang BMD</li><li>3. Pakta Integritas</li><li>4. Labelling BMD setiap semesteran</li><li>5. KIR</li><li>6. KIB</li><li>7. BA Serah Terima Aset</li><li>8. Rekon Aset</li></ol> | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Penyusunan Pakta Integritas pemegang Barang Milik Daerah | Inspektur | Triwulan I |
|----|--|---|---|--|-----------|------------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Nama Pemda</b>          | Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga  |
| <b>Tahun Penilaian</b>     | 2025   |
| <b>Tujuan Strategis</b>    | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga<br>Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah |
| <b>Urusan Pemerintahan</b> | Urusan Pengawasan  |

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan  | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian | Penyedia Informasi                    | Penerima Informasi   | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|----|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|------------|
| a  | b  | c                                    | d                                     | e  | f                         | g                           | h          |
| 1  | Pendampingan identifikasi potensi kecurangan   | Rapat /FGD                           | Inspektorat Daerah,                   | OPD Terkait, Tim Pendampingan                              | Januari 2025              |                             |            |
| 2  | Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi   | Rapat /FGD                           | Inspektorat Daerah,                   | Asesor Pemda, Asesor OPD, Satgas SPIP, Tim PK atas PM SPIP | April 2025                |                             |            |
| 3  | Pendampingan dan Konsultasi Penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan   | Rapat /FGD                           | Tim Tindak Lanjut, Inspektorat Daerah | OPD Terkait, Tim Monitoring Tindak Lanjut                  | Setiap bulan              |                             |            |
| 4  | Evaluasi atas Rencana Tindak Pengendalian risiko fraud OPD   | Rapat/ FGD                           | Inspektorat Daerah                    | OPD Terkait, Tim Evaluasi RTP                              | Tribulan I                |                             |            |
| 5  | Sosialisasi Perbup Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan  | Rapat/ FGD/ Surat                    | Inspektorat Daerah                    | OPD Terkait,PAKSI  | Februari 2025             |                             |            |
| 6  | Mendorong partisipasi aktif pimpinan auditee selama proses pengawasan kinerja  | Rapat/ FGD/ Surat                    | Inspektorat Daerah                    | OPD Terkait, Tim Audit                                     | Setiap awal penugasan     |                             |            |
| 7  | Mengirimkan peserta Diklat terkait pengawasan keuangan   | Rapat                                | Inspektorat Daerah                    | Tim Pemeriksa  | Triwulan I, II, III       |                             |            |
| 8  | Pendampingan/ desk pada OPD tindak lanjut hasil pemeriksaan  | Rapat/ FGD                           | Inspektorat Daerah                    | OPD Terkait, Tim Monitoring Tindak Lanjut                  | Setiap awal penugasan     |                             |            |
| 9  | Mengirimkan peserta diklat audit kinerja   | Rapat                                | Inspektorat Daerah                    | Tim Pemeriksa  | #REF!                     |                             |            |
| 10 | Peningkatan kompetensi bagi tim pemeriksa/auditor  | Rapat/ FGD/ Diklat                   | Inspektorat Daerah                    | Tim Pemeriksa  | Triwulan II               |                             |            |
| 11 | Mendorong partisipasi aktif pimpinan auditee selama proses pengawasan keuangan   | Rapat/ FGD/ Surat                    | Inspektorat Daerah                    | OPD Terkait  | Triwulan II               |                             |            |
| 12 | Menyusun roadmap pemenuhan SDM APIP sesuai dengan rekomendasi/anjak ABK dan menyampaikan usulan pemenuhan SDM APIP ke Bupati | Rapat                                | Inspektorat Daerah                    | Kepala Daerah, OPD Terkait, Tim Kapabilitas APIP           | Maret 2025                |                             |            |

|    |   |                   |                     |  |               |  |  |
|----|---|-------------------|---------------------|--|---------------|--|--|
| 13 | Menyusun daftar Evidence pemenuhan PM SPIP  | Rapat/ FGD/ Surat | Inspektorat Daerah, | Tim Satgas SPIP Kabupaten  | Triwulan II   |  |  |
| 14 | Pendampingan/ desk penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB)   | Rapat/FGD         | Inspektorat Daerah  | OPD Terkait, Tim Evaluator RB                                      | Triwulan II   |  |  |
| 15 | Pendampingan Persiapan Penilaian Zona Integritas  | Rapat/FGD         | Inspektorat Daerah  | OPD Terkait, Tim Penilai Internal                                  | Februari 2025 |  |  |
| 16 | Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Internal dan Tim Pembangunan zona Integritas Unit Kerja   | Rapat/FGD/ Bimtek | Instansi Pengampu   | Tim Penilai Internal, Tim Pembangunan Zona Integritas, OPD Terkait | Maret 2025    |  |  |
| 17 | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS.<br>2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin<br>3. Pemberian reward<br>4. Evaluasi Berjenjang | Rapat/ Surat      | Inspektorat Daerah  | Pegawai Inspektorat Daerah   | Setiap Bulan  |  |  |
| 18 | Rapat Koordinasi rencana pengadaan  | Rapat             | Inspektorat Daerah  | Tim Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan,                         | Triwulan I    |  |  |
| 19 | Penyusunan Pakta Integritas pemegang Barang Milik Daerah  | Rapat/ Surat      | Inspektorat Daerah  | Pemakai BMD, Pengurus Barang                                       | Triwulan I    |  |  |